

**STRATEGI KOMUNIKASI *WORLD RESOURCES ISTITUTE*
(WRI) INDONESIA DALAM PROSES PENDAMPINGAN
KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DI HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKm) BUKIT SULTAN
DESA LAMTANJONG, KAB. ACEH BESAR**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AFIADI

NIM. 180401070



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 1446 H / 2025**

**STRATEGI KOMUNIKASI WORLD RESOURCES ISTITUTE (WRI)
INDONESIA DALAM PROSES PENDAMPINGAN KELOMPOK
PERHUTANAN SOSIAL DI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
BUKIT SULTAN DESA LAMTANJONG, KAB. ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

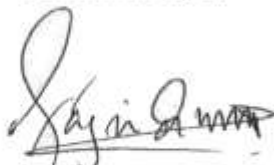
Oleh:

**AFIADI
NIM. 180401070**

Disetujui Oleh:

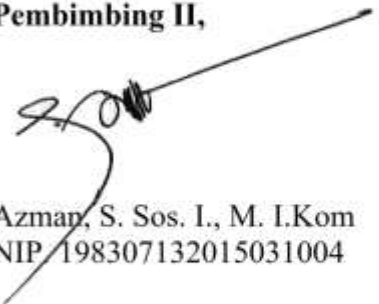
AR - RANIRY

Pembimbing I,



Fajri Chairawati, S.Pd. I., M. A
NIP. 19790330200312002

Pembimbing II,



Azman, S. Sos. I., M. I.Kom
NIP. 198307132015031004

SKRIPSI

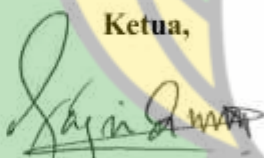
**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh:


**AFIADI
NIM. 180401070**

Pada Hari/Tanggal Rabu, 23 April 2025 M
24 Syawal 1446 H
di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia sidang munaqasyah

Ketua,


**Fajri Chairawati, S. Pd. I., M. A
NIP. 19790330200312002**

Sekretaris,


**Azman, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 198307132015031004**

Anggota I 


**Drs. Yusri, M. LIS
NIP.196712041964031004**

Anggota II,


**Fitri Melya Sari, S.I.kom., M.I.Kom
NIP. 199006112020122015**



**Mengetahui,
1 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.pd
NIP. 196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFIADI
NIM : 180401070
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini Saya menyatakan bahwa jarya tulis dengan judul “*World Resources Istitute (WRI) Indonesia dalam Proses Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bukit Sultan Desa Lamtanjong, Kab. Aceh Besar*” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada Saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 22 April 2025

Yang membuat pernyataan,



AFIADI

180401070

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Komunikasi *World Resources Institute (WRI) Indonesia* Dalam Proses Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial di HKm HKm Bukit Sultan Desa Lamtanjong, Lamtanjong, Kab. Aceh Besar”. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Asmaniar, karena sejak Awal perkuliahan telah memberi mendidik, membesarkan, membiayai, serta memberikan motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag dan jajarannya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Syahril Furqany, S.I.Kom.,M.Kom dan Ibu Hanifah, S.Sos.I.,M.Ag selaku Ketua dan sekretaris prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ibu Anita, S.Ag.,M. Hum selaku penasihat Akademik, Ibu Fajri Chairawati, S.Pd.I.,M.A dan Azman, S.Sos.I.,M.I.Kom sebagai pembimbing I dan pembimbing II, atas bimbingan dan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Drs. Yusri,M.L.I.S. dan Ibu Fitri Meliya Sari, S.I.Kom.,M.I.Kom. selaku penguji 1 dan penguji 2 yang telah memberikan masukan serta koreksi membangun demi penyempurnaan karya ini, kepada para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang dengan tulus telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis agar mencapai kematangan intelektual dalam berbagai mata kuliah. Demikian juga kepada para karyawan-karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan berbagai administrasi perkuliahan serta kepada kepala dan pengurus perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku maupun informasi lainnya.

6. Kepada bapak, kakak dan abang-abang di *World Resources Institute Indonesia* Regional Aceh yang telah banyak membantu saya dalam mendapatkan informasi juga kepada para anggota Hutan Kemasyarakatan (HKm) HKm Bukit Sultan. Demikian juga kepada sahabat terdekat Amal Reja S.sos dan pujaan hati Siti Rahimah yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, setia mendampingi dan memotivasi

Akhirnya penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa karya ini hanyalah langkah awal dari upaya tanpa akhir untuk mengembangkan potensi pada diri penulis sendiri. Oleh sebab itu, atas segala bantuan, bimbingan dan arahan serta amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya mampu mendo'akan kepadaiii Allah swt. semoga menjadi amal baik dan senantiasa selalu diridhai-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun redaksi bahasanya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan beserta arahan yang sifatnya membangun dari segenap pembaca demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Mudah-mudahan karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 22 April 2025

AFIADI

NIM. 180401070

ABSTRAK

Nama : AFIADI
NIM : 180401070
Judul Skripsi : *World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam Proses Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bukit Sultan Desa Lamtanjong, Kab. Aceh Besar*
Prodi/Fakultas : **Komunikasi dan Penyiaran Islam/Dakwah dan Komunikasi**

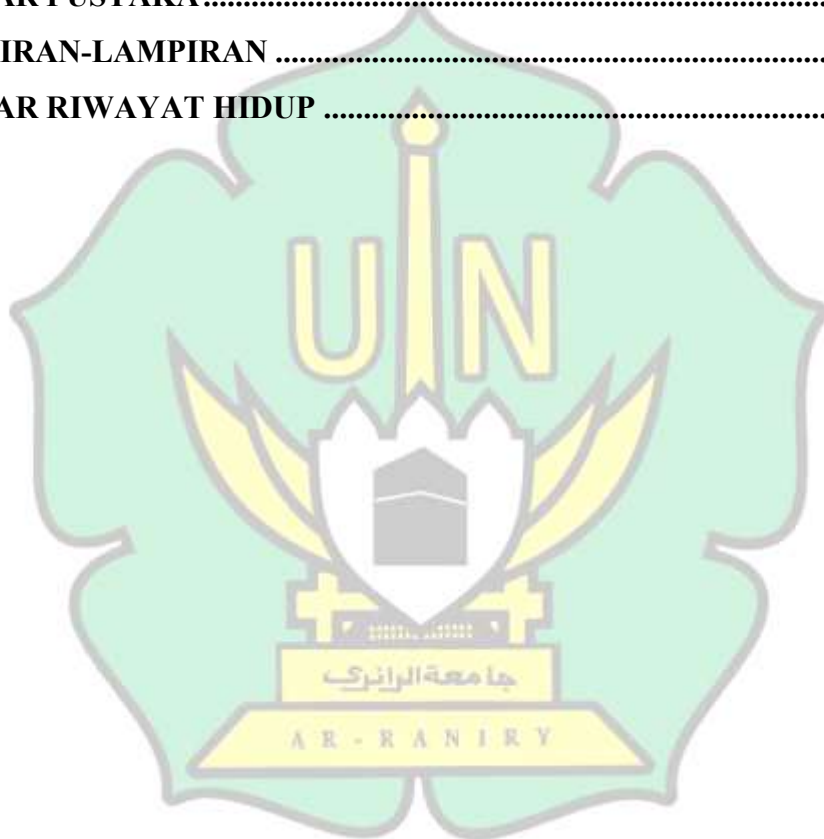
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm HKm Bukit Sultan Lamtanjong, Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *WRI Indonesia* menggunakan strategi komunikasi Pembangunan partisipatif yang melibatkan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, serta pemanfaatan media lokal. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan serta memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan. Tahapan pendampingan yang dilakukan meliputi tahap sosialisasi, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi, akses informasi, dan dinamika sosial di tingkat komunitas. *WRI Indonesia* merespons hambatan ini dengan strategi komunikasi yang adaptif dan berbasis konteks lokal. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi pembangunan, komunikasi lingkungan, teori partisipatif, dan agenda setting untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan.

Kata kunci: *Strategi Komunikasi, WRI Indonesia, Perhutanan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Aceh Besar.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	6
F. Tabel Definisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Komunikasi Pembangunan.....	12
C. Perhutanan Sosial di Indonesia.....	20
D. World Resources Institute (WRI) Indonesia.....	24
E. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Teknik Analisis Data	29
E. Teknik Keabsahan Data	30
F. Prosedur Penelitian.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Gambaran Umum World Resources Institute (WRI) Indonesia	42

C.	Strategi Komunikasi WRI Indonesia dalam Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial di HKm Bukit Sultan	59
D.	Tahapan Pendampingan	66
E.	Hambatan dalam Pendampingan	71
F.	Analisis Data Berdasarkan Kerangka Teori Komunikasi Pembangunan	84
BAB V PENUTUP		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN-LAMPIRAN		95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		117



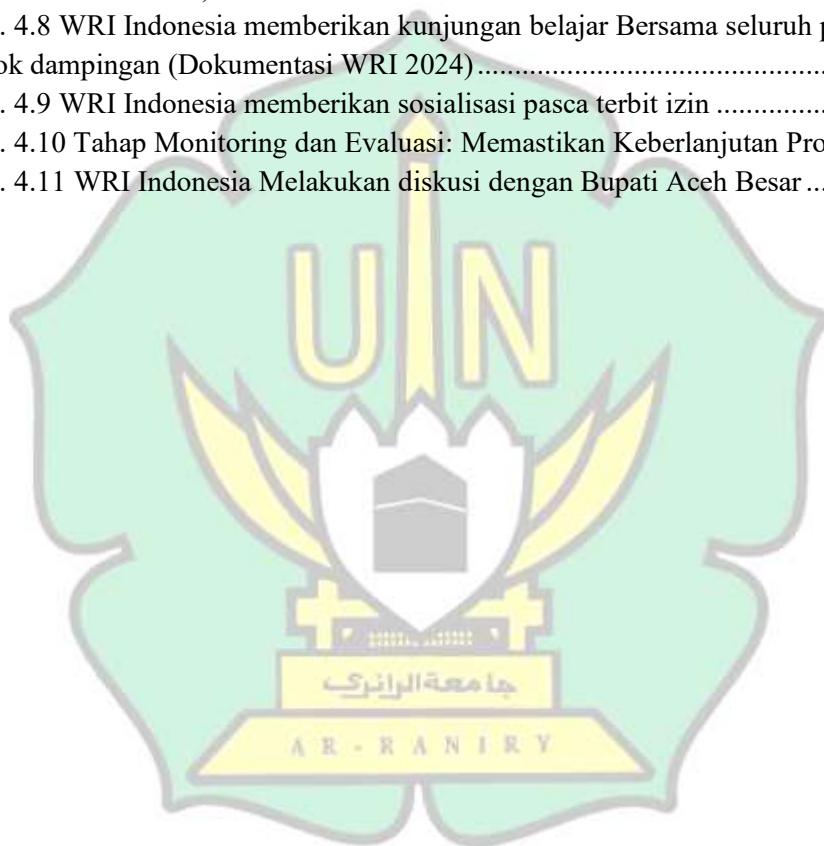
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel	7
Tabel 2.1 Jumlah Anggota Kelompok Perhutanan Sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong	23
Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Pendampingan WRI Indonesia untuk Kelompok Perhutanan Sosial	39
Tabel 4.2 Dampak Sosial-Ekonomi dari Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial ...	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran yang digunakan	26
Gambar 4.1 Lokasi Penelitian, Desa Lamtanjong, Suka Makmur, Aceh Besar	33
Gambar 4.2 Lampiran SK HKm Bukit Sultan	38
Gambar 4.3 Struktur Organisasi World Resources Institute Regional Aceh Tahun 2025.43	
Gambar 4.4 Poster salah satu program WRI Indonesia	49
Gambar. 4.5 WRI Melakukan Diskusi dengan kelompok HKm Bukit Sultan	55
Gambar. 4.7 WRI Melakukan Diskusi Kelompok Terkait Luas dan Batas Wilayah (Dokumentasi WRI 2024)	61
Gambar. 4.8 WRI Indonesia memberikan kunjungan belajar Bersama seluruh perwakilan kelompok dampingan (Dokumentasi WRI 2024)	62
Gambar. 4.9 WRI Indonesia memberikan sosialisasi pasca terbit izin	67
Gambar. 4.10 Tahap Monitoring dan Evaluasi: Memastikan Keberlanjutan Program	69
Gambar. 4.11 WRI Indonesia Melakukan diskusi dengan Bupati Aceh Besar	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Wawancara Informan: WRI Indonesia.....	95
Lampiran 2. Lembar Wawancara Informan: Warga/Peserta Program	100
Lampiran 3. Wawancara Dengan Narasumber	106
Lampiran 3. Kegiatan Diskusi Kelompok	109
Lampiran 4. Penerimaan Bantuan Bibit dari DPRK Aceh Besar	110
Lampiran 5. Penerimaan Bantuan Bibit dari DLHK Aceh	111
Lampiran 6. SK HKm Bukit Sultan dan Surat Balasan Penelitian	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, klasifikasi kawasan hutan memiliki dasar hukum yang kuat dan fungsional dalam pelestarian ekosistem, pemanfaatan hasil hutan, serta keterlibatan masyarakat. Pemahaman terhadap jenis-jenis kawasan hutan sangat penting, terutama dalam konteks kebijakan Perhutanan Sosial yang digalakkan oleh pemerintah. Kawasan hutan didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹ Kawasan hutan secara umum dibagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan guna mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung menitikberatkan pada fungsi ekologis dengan pembatasan tinggi terhadap aktivitas pemanfaatan langsung.² Sementara itu, hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai perlindungan keanekaragaman hayati serta sistem penyangga kehidupan.³ Hutan konservasi terdiri dari *Kawasan Suaka Alam* (KSA), seperti cagar alam dan suaka margasatwa, serta *Kawasan Pelestarian Alam* (KPA), seperti taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Kegiatan pemanfaatan pada hutan konservasi sangat terbatas dan hanya diperbolehkan dalam bentuk tertentu, seperti penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, atau melalui skema kemitraan konservasi.

Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, kelestarian lingkungan, dan dinamika sosial budaya.⁴ Salah satu skema dalam Perhutanan Sosial adalah Hutan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat 3.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 8.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pasal 1 Ayat 1.

Kemasyarakatan (HKm), yaitu pengelolaan hutan lindung dan/atau hutan produksi oleh kelompok tani hutan yang tinggal di sekitar hutan dan secara langsung menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan.

Berdasarkan regulasi dan dokumen teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan hutan yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya: merupakan kawasan hutan negara berupa hutan produksi, hutan produksi terbatas, atau hutan lindung (dengan pembatasan tertentu); tidak berada dalam kawasan yang sedang dalam sengketa atau konflik batas wilayah; tidak sedang dikuasai oleh izin lain yang aktif, kecuali melalui mekanisme kemitraan; terdapat keberadaan masyarakat setempat secara *de facto* yang sudah mengelola wilayah tersebut; serta telah dilakukan verifikasi teknis dan sosial oleh pihak berwenang, seperti Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL).⁵

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga tahun 2024 telah diberikan akses kelola hutan sosial kepada lebih dari 7,8 juta hektare lahan.⁶ Meski demikian, implementasi perhutanan sosial di berbagai daerah, termasuk di Aceh Besar, masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan, kurangnya akses informasi, serta minimnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Di tengah berbagai kendala tersebut, peran organisasi non-pemerintah menjadi sangat penting, salah satunya adalah *World Resources Institute (WRI) Indonesia*. *WRI Indonesia* berfokus pada isu-isu lingkungan, termasuk mendorong praktik pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan komunikasi yang efektif.

Strategi komunikasi menjadi elemen kunci dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial, bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran, memperkuat kapasitas lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka.

Komunikasi pembangunan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan. Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Petunjuk Teknis Verifikasi Usulan Perhutanan Sosial.

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). Data Akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional.

penyebaran informasi yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial dan pembangunan ekonomi⁷.

Dalam konteks ini, *World Resources Institute (WRI) Indonesia* berperan aktif mendampingi kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, Aceh Besar, melalui strategi komunikasi yang berbasis partisipasi masyarakat.

HKm Bukit Sultan, yang terletak di Kecamatan Lamtanjong, Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu lokasi perhutanan sosial yang mendapat pendampingan dari *WRI Indonesia*. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar, namun juga menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelompok, serta pengaruh eksternal seperti ancaman alih fungsi lahan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan *WRI Indonesia* dapat mendorong keberhasilan program perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan. Strategi komunikasi yang digunakan oleh *WRI Indonesia* dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, Aceh Besar, sebagai kontribusi terhadap pengembangan pendekatan komunikasi pembangunan yang lebih efektif di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan adalah belum optimalnya penyebaran informasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan hutan lestari, serta lemahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan tersebut.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang tepat diperlukan agar proses pendampingan tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga mampu membangun pemahaman kritis dan mendorong perubahan perilaku kolektif di tingkat masyarakat lokal.

Strategi komunikasi yang dikembangkan oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia* perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami pendekatan, teknik, serta media komunikasi yang digunakan dalam mendukung proses pendampingan.

World Resources Institute (WRI) Indonesia sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan, turut mengambil peran dalam

⁷ Rogers, Everett M. (2003). *Diffusion of Innovations*. Fifth Edition. New York: Free Press.

mendukung program perhutanan sosial di berbagai daerah, termasuk di HKm Bukit Sultan Lamtanjong, Kabupaten Aceh Besar⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “*Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, Aceh Besar?*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan Lamtanjong, Aceh Besar?
2. Apa saja faktor tantangan dan upaya dalam penerapan strategi komunikasi *WRI Indonesia* dalam mendampingi kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharap dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan Lamtanjong, Aceh Besar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tantangan dan upaya dalam penerapan strategi komunikasi *WRI Indonesia* dalam mendampingi kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan.

⁸ World Resources Institute Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Program Perhutanan Sosial di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi pembangunan dan komunikasi lingkungan, melalui studi tentang strategi komunikasi dalam pendampingan program perhutanan sosial.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi komunikasi lembaga non-pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas strategi komunikasi yang digunakan dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial.
- b. Menjadi acuan bagi lembaga pendamping lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam merancang strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran untuk program-program pemberdayaan masyarakat di sektor lingkungan.

3. Manfaat Sosial

- a. Mendorong peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas, sehingga program perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan dan daerah lain dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Kecamatan Lamtanjong, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana *WRI Indonesia* merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi komunikasinya dalam upaya mendukung penguatan kapasitas kelompok masyarakat pengelola hutan.

Adapun aspek komunikasi yang dianalisis mencakup pendekatan komunikasi pembangunan, komunikasi lingkungan, komunikasi partisipatif, dan pemanfaatan media komunikasi dalam konteks perhutanan sosial. Penelitian ini juga membatasi pembahasan hanya pada aktivitas pendampingan yang dilakukan dalam periode tahun 2022 hingga 2024, sesuai dengan program aktif *WRI Indonesia* di kawasan tersebut.

Batasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian tidak membahas secara mendalam aspek teknis kehutanan, seperti teknik budidaya tanaman hutan atau konservasi teknis, melainkan fokus pada strategi komunikasi pendampingan.
2. Informasi yang dikumpulkan berasal dari dokumen resmi *WRI Indonesia*, wawancara dengan pihak pendamping (fasilitator *WRI*), serta observasi langsung terhadap kegiatan pendampingan di lapangan.
3. Subjek penelitian dibatasi pada kelompok masyarakat yang tergabung dalam skema perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan dan pihak pendamping dari *WRI Indonesia*, tanpa melibatkan aktor eksternal lain seperti pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat lain di luar *WRI Indonesia*.

Dengan adanya ruang lingkup dan batasan ini, diharapkan penelitian dapat lebih terarah serta menghasilkan analisis yang mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Tabel Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Sub-Variabel/Indikator	Definisi Operasional	Teknik Pengumpulan Data
1	Strategi Komunikasi WRI Indonesia	1. Pendekatan komunikasi 2. Media komunikasi yang digunakan 3. Penyusunan pesan 4. Teknik partisipasi masyarakat 5. Evaluasi komunikasi	Serangkaian perencanaan dan implementasi komunikasi oleh WRI Indonesia untuk mendukung pendampingan perhutanan sosial di HKM Bukit Sultan, yang mencakup pendekatan yang digunakan, pemilihan media, pembuatan pesan, pelibatan masyarakat, dan	Wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi

			evaluasi hasil komunikasi.	
2	Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk aktivitas pendampingan 2. Frekuensi pendampingan 3. Hasil pendampingan 	Aktivitas fasilitasi, pelatihan, dan bimbingan yang dilakukan WRI Indonesia terhadap kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan.	Wawancara mendalam, observasi, studi dokumen program
3	Kelompok Perhutanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi anggota 2. Tingkat pemahaman pengelolaan hutan 3. Kemandirian kelompok 	Kelompok masyarakat yang mengelola hutan sosial di HKm Bukit Sultan berdasarkan izin resmi, dengan indikator keterlibatan aktif, pemahaman, dan kemandirian dalam pengelolaan.	Wawancara dengan anggota kelompok, observasi kegiatan kelompok

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nurul Istiqomah, dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Komunikasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) dalam Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Sukabumi*”, menjelaskan bagaimana instansi pemerintah membangun strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi interpersonal dan pendekatan budaya lokal. Penelitian tersebut relevan karena mengulas strategi komunikasi dalam konteks program perhutanan sosial, meskipun berfokus pada instansi pemerintah, bukan NGO.⁹
2. Muhammad Farhan, dalam tesisnya yang berjudul “*Peran Komunikasi Lingkungan dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Luwu Timur*”, menekankan pada pentingnya komunikasi lingkungan dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap konservasi hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan pola komunikasi dua arah antara fasilitator dan masyarakat.¹⁰
3. Desi Kartika, dalam jurnalnya “*Strategi Komunikasi Komunitas Konservasi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan*” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Komunikasi*

⁹ Istiqomah, N. (2020). Strategi komunikasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di Kabupaten Sukabumi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁰ Farhan, M. (2021). Peran komunikasi lingkungan dalam program rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Luwu Timur (Tesis, Universitas Hasanuddin).

Pembangunan, menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran kolektif. Strategi yang berbasis pada nilai-nilai lokal lebih mudah diterima oleh masyarakat sasaran. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman pentingnya komunikasi berbasis komunitas.¹¹

4. Sinta Dewi, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Strategi Komunikasi LSM dalam Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kalimantan Barat*”,
5. perhutanan sosial sangat ditentukan oleh efektivitas strategi komunikasi yang digunakan, terutama yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan mampu mengkaji bagaimana LSM menggunakan pendekatan kolaboratif dan edukatif dalam strategi komunikasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan media dan cara penyampaian pesan yang sesuai dengan kondisi lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program.¹²
6. Riski Maulana, dalam penelitiannya yang berjudul “*Komunikasi Pembangunan dalam Perhutanan Sosial: Studi pada Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Gunungkidul*” meneliti bagaimana komunikasi pembangunan digunakan untuk meningkatkan kapasitas petani hutan. Penelitian ini menekankan bahwa selain informasi teknis, penyampaian nilai sosial dan ekonomi juga penting dalam komunikasi pembangunan yang efektif.¹³
7. Penelitian Dewi Lestari (2020), dengan judul penelitian *Strategi Komunikasi Pendamping dalam Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Bungo*, menemukan bahwa Strategi komunikasi

¹¹ Kartika, D. (2019). Strategi komunikasi komunitas konservasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 123–132.

¹² Dewi, S. (2022). Analisis strategi komunikasi LSM dalam program pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kalimantan Barat (Skripsi, Universitas Tanjungpura).

¹³ Maulana, R. (2021). Komunikasi pembangunan dalam perhutanan sosial: Studi pada kelompok tani hutan di Kabupaten Gunungkidul (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).

interpersonal efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan social adapun relevansinya dengan penelitian ini adalah Memberikan gambaran tentang pentingnya komunikasi interpersonal dalam pendampingan perhutanan sosial.

8. Penelitian Muhammad Farhan (2021) dengan judul *Peran Komunikasi Pemberdayaan dalam Peningkatan Kapasitas Petani Hutan di Jawa Tengah* menemukan bahwa Komunikasi partisipatif meningkatkan kesadaran dan kapasitas pengelolaan sumber daya alam adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah Menunjukkan bagaimana pendekatan partisipatif dapat memperkuat hasil program perhutanan sosial.
9. Penelitian Sari Ningsih (2019) dengan judul *Implementasi Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Sumatera Selatan* menemukan Faktor keberhasilan program adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi relevansinya dengan penelitian ini adalah Menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai subjek aktif dalam program kehutanan
10. Penelitian Ridho Saputra (2022), dengan judul *Komunikasi Lingkungan dalam Program Perhutanan Sosial di Aceh* menemukan bahwa Efektivitas komunikasi lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan program perhutanan social sedangkan relevansinya dengan penelitian ini adalah Memberikan dasar teori untuk membahas aspek komunikasi lingkungan dalam konteks pendampingan WRI Indonesia

Berdasarkan berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program berbasis lingkungan seperti membangun kesadaran masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas strategi komunikasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) seperti *WRI Indonesia*, khususnya dalam konteks HKM Bukit Sultan, Aceh Besar. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kontribusi baru dalam mengisi kekosongan tersebut.

B. Komunikasi Pembangunan

1. Komunikasi

Komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan memberikan stimulus, baik secara lisan, tulisan, maupun gerakan, demi menciptakan pengaruh tertentu pada orang yang menerimanya.¹⁴ Para ahli komunikasi memberikan berbagai definisi tentang komunikasi. Wursanto menjelaskan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan aktivitas penyebaran atau pertukaran pesan, berita, maupun informasi yang memiliki makna tertentu. B. Aubrey Fisher berpendapat bahwa keberhasilan komunikasi dapat diukur ketika ide atau informasi yang disampaikan telah dipahami secara bersama dan memiliki makna yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.¹⁵

Sementara itu, Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai suatu mekanisme penyampaian gagasan dari pengirim kepada satu atau beberapa penerima dengan tujuan memodifikasi perilaku mereka. Harold D. Lasswell menyajikan definisi yang lebih ringkas, dengan menyatakan bahwa esensi suatu tindakan komunikasi dapat dijelaskan melalui lima unsur utama: siapa yang berkomunikasi (komunikator), apa yang disampaikan (pesan), melalui saluran apa (media), kepada siapa (komunikan), serta dampak apa yang dihasilkan.¹⁶

Dari uraian di atas jelas bahwa komunikasi melibatkan proses penyampaian gagasan dari pihak pengirim kepada penerima dengan

¹⁴ Liya Virdha Handayani, dkk, 2021, "Pengaruh Komunikasi tentang Vaksin Sinovac terhadap kesadaran masyarakat di Desa Jembrak kabupaten Semarang", *Jurnal Farmasi dan Kesehatan*. Vol 10, No 1. 2019, hlm. 19.

¹⁵ Mahi M. Hikmat, "Jurnalistik Literary Journalism" (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2018) hlm. 11.

¹⁶ Hafied Cangara, "Pengantar Ilmu Komunikasi", (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2012) hlm 22.

menggunakan saluran komunikasi tertentu untuk menghasilkan perubahan pada penerima pesan.

Terdapat banyak definisi komunikasi yang telah disampaikan oleh para pakar komunikasi. Namun seiring perkembangan zaman membuat pengertian komunikasi terus berkembang, yang dahulu mendefinisikan komunikasi hanya sebatas dua orang atau lebih tanpa menggunakan media, kini komunikasi tidak hanya sebatas seperti itu saja, bahkan media kini menjadi salah satu alat vital guna kesuksesan komunikasi yang dilakukan. Dari pengertian diatas pula dapat dianalisis beberapa komponen yang membentuk suatu proses komunikasi. Adapun komponen-komponen tersebut antara lain:

- a. Komunikator, merupakan pelaku yang menyampaikan atau mengirimkan pesan, baik individu maupun kelompok.
- b. Pesan, merupakan ide, gagasan, pendapat, informasi, ataupun materi yang disampaikan. Sesuatu yang disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pesan tersebut dapat menarik perhatian sasaran yang dituju.
- c. Channel, saluran komunikasi yang digunakan. Adapula yang mengartikan Channel ini sebagai media komunikasi.
- d. Komunikan, pelaku yang menerima pesan. Komunikan dapat bertindak sebagai komunikan individu ataupun komunikan kelompok.
- e. Efek, sesuatu yang timbul karena proses komunikasi, hal ini dapat berupa tanggapan, respon, ataupun umpan balik. Komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu, juga dapat berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu komunikasi kemudian melahirkan sub-sub baru antara lain: komunikasi politik, manajemen komunikasi, sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, komunikasi lintas budaya, hingga komunikasi pemerintahan.

2. Pembangunan

Komunikasi secara terminologi berasal dari bahasa latin *Communico* yang artinya membagi, dan *Communis* yang artinya sama, sama disini diartikan sebagai sama makna¹⁷. Jadi berkomunikasi berarti berusaha untuk mencapai kesamaan makna atau kesamaan arti antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Agar orang mempunyai kesamaan makna maka komunikasi tidak hanya bersifat informatif saja, melainkan juga harus bersifat persuasif. Menurut Gie, komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam- macam kepentingan dari seseorang kepada orang lain¹⁸.

Dalam hal ini terdapat penyaluran gagasan dari seseorang ke orang lain guna mendapatkan pengertian yang sama serta menimbulkan suatu tindakan. Sedangkan menurut Hovland komunikasi berarti proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Komunikasi merupakan proses sosial yang terjadi antara sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada orang lain. Stimulus dapat disebut sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk verbal, dimana proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi, dan terjadi perubahan atau respons terhadap pesan yang disampaikan¹⁹.

Sebagai suatu disiplin ilmu, definisi komunikasi hingga saat ini telah sangat banyak diutarakan oleh ilmuwan komunikasi itu sendiri. Setiap definisi memiliki perspektif yang berbeda-beda. Seperti halnya yang disampaikan oleh Lasswell tahun 1948, dia membuat definisi komunikasi dengan merumuskan “Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect”, dalam pandangan Lasswell komunikasi meliputi 5 (lima) unsur, yaitu; komunikator,

¹⁷ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1997), h. 9.

¹⁸ Rismi Somad dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Komunikasi (Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 115.

¹⁹ *Ibid.*,h. 116.

pesan, media, komunikan, dan efek. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu²⁰.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan berupa lambang-lambang yang di dalamnya terdapat unsur rangsangan kepada orang lain dengan tujuan menyamakan pemikiran antara pengirim dan penerima²¹. Hal yang sama disampaikan oleh Rogers bersama Lawrence Kincaid bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam²².

Terdapat banyak definisi komunikasi yang telah disampaikan oleh para pakar komunikasi. Namun seiring perkembangan zaman membuat pengertian komunikasi terus berkembang, yang dahulu mendefinisikan komunikasi hanya sebatas dua orang atau lebih tanpa menggunakan media, kini komunikasi tidak hanya sebatas seperti itu saja, bahkan media kini menjadi salah satu alat vital guna kesuksesan komunikasi yang dilakukan. Dari pengertian diatas pula dapat dianalisis beberapa komponen yang membentuk suatu proses komunikasi. Adapun komponen-komponen tersebut antara lain:

- a. Komunikator, merupakan pelaku yang menyampaikan atau mengirimkan pesan, baik individu maupun kelompok.
- b. Pesan, merupakan ide, gagasan, pendapat, informasi, ataupun materi yang disampaikan. Sesuatu yang disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pesan tersebut dapat menarik perhatian sasaran yang dituju.
- c. Channel, saluran komunikasi yang digunakan. Adapula yang mengartikan Channel ini sebagai media komunikasi.

²⁰ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, h. 10.

²¹ H. A. W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 15.

²² Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 19.

- d. Komunikasikan, pelaku yang menerima pesan. Komunikasikan dapat bertindak sebagai komunikasikan individu ataupun komunikasikan kelompok.
- e. Efek, sesuatu yang timbul karena proses komunikasi, hal ini dapat berupa tanggapan, respon, ataupun umpan balik. Komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu, juga dapat berhubungan dengan disiplin

3. Komunikasi Pembangunan

Komunikasi Pembangunan seperti halnya dengan komunikasi bisnis, komunikasi pendidikan, dan sebagainya dimana terdapat 2 (dua) disiplin ilmu yang dikombinasikan menjadi suatu disiplin ilmu. Dalam hal ini 2 (dua) disiplin ilmu tersebut antara lain: komunikasi dan pembangunan. Quebral dan Gomez telah merumuskan Komunikasi Pembangunan, dimana Komunikasi Pembangunan adalah disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk mencapai perubahan sosial yang berencana. Komunikasi Pembangunan ini lebih mengutamakan kegiatan mendidik dan memberi motivasi kepada masyarakat agar menjadi lebih baik. Komunikasi Pembangunan bertujuan untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Zulkarimein Nasution, komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara pemerintah dengan masyarakat.²³ Dalam hal ini bukan hanya dalam proses pembangunan saja, melainkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan itu sendiri.

²³ Zulkarimein Nasution, Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya, ..., h.92.

Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat luas.²⁴

Dalam arti sempit ini kegiatan komunikasi pembangunan bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan Onong Uchjana Effendy merumuskan komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya guna meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan. Hedebro mengidentifikasi tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya, yaitu:²⁵

- a. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Di sini, politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah yang menyangkut struktur organisasional dan pemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi jenis ini, sekarang digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat general (umum).
- b. Pendekatan yang juga dimaksudkan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik. Persoalan utama dalam studi ini adalah bagaimana media

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., h. 79

dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa.

- c. Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Studi jenis ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.

Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk memajukan pembangunan. Dalam suatu pembangunan, Sanders melihat komunikasi dari 4 (empat) perspektif, yaitu komunikasi sebagai proses, metode, program, dan gerakan sosial. Dalam penelitian ini, dalam setiap acara di HKM Bukit Sultan Aceh Besar terdapat komunikasi pembangunan yang dilakukan World Resources Institute (WRI) guna menyukkseskan pendampingan kelompok perhutanan sosial. Bagaimana proses komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) guna menyampaikan tujuan sebenarnya dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

4. Bentuk Komunikasi Pembangunan

Bentuk komunikasi pembangunan hampir sama dengan bentuk komunikasi pada umumnya. Hanya saja dalam komunikasi pembangunan hanya pada pesan yang disampaikanlah yang membedakannya. Bentuk-bentuk komunikasi antara lain:²⁶

Komunikasi persona terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersona (antar pribadi) dan komunikasi intrapersona. Komunikasi interpersona menurut Deddy Mulyana adalah komunikasi antara orang-orang

²⁶ Ali Nuridin dkk, Pengantar Ilmu Komunikasi (Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya), (Surabaya: IAIN Sunan AmpelPress, 2013),

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk komunikasi interpersonal ini dapat dibedakan menjadi dua; pertama, komunikasi diadik, yaitu komunikasi yang berlangsung yakni komunikasi yang berlangsung antara tiga orang, satu orang sebagai komunikator dan dua orang lainnya sebagai komunikan.²⁷

Sedangkan komunikasi intrapersonal menurut Ronald L. Applbaum adalah komunikasi yang berlangsung pada diri seorang individu, baik berupa kegiatan berbicara kepada diri sendiri, mengamati, serta memberi makna terhadap lingkungan. Dari segi psikologis, komunikasi intrapersona meliputi:

a. Aspek Kognitif

Aspek kognitif ini meliputi sensasi dan persepsi. Sensasi berasal dari kata “sense” yang diartikan alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi merupakan proses penginderaan yang kemudian diubah menjadi bahasa yang dapat diterjemahkan oleh otak. Sedangkan persepsi merupakan pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sehingga membentuk suatu informasi.

b. Aspek Afektif

Dalam aspek afektif ini terdapat motifasi dan kebutuhan. Motifasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Motifasi dapat diterapkan dalam setiap segi kehidupan. Tidak sering manusia termotifasi karena suatu kebutuhan. Sedangkan kebutuhan itu merupakan sesuatu hal yang harus terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Setiap manusia memiliki kadar kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi:

²⁷ Ibid., h. 121

kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, prestasi, dan sebagainya.

c. Aspek Konatif

Aspek ini berhubungan dengan kecenderungan seorang manusia untuk bertindak, menggambarkan jiwa seseorang yang aktif dan dinamis.

C. Perhutanan Sosial di Indonesia

1. Pengertian Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budayasetempat. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.²⁸

Melalui skema ini, masyarakat diberikan hak legal untuk mengelola kawasan hutan melalui beberapa skema, seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

2. Tujuan Perhutanan Sosial

Tujuan utama dari program perhutanan sosial di Indonesia adalah:

²⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

- a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan.
- b. Pengurangan Konflik Tenurial: Menyelesaikan tumpang tindih klaim lahan antara negara dan masyarakat adat atau lokal.
- c. Pelestarian Lingkungan: Mendorong pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kelestarian ekosistem.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan terhadap usaha berbasis hutan.

3. Skema-Skema Perhutanan Sosial

Menurut regulasi KLHK, terdapat lima skema utama dalam perhutanan sosial:

- a. Hutan Desa (HD): Pengelolaan hutan oleh desa adat atau desa administratif.
- b. Hutan Kemasyarakatan (HKm): Hak kelola oleh kelompok masyarakat dalam kawasan hutan produksi atau lindung.
- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Pengelolaan hutan tanaman di hutan produksi untuk meningkatkan hasil ekonomi masyarakat.
- d. Kemitraan Kehutanan: Kerja sama antara masyarakat dan pengelola hutan negara (BUMN Kehutanan, Perhutani, dll).
- e. Hutan Adat: Pengakuan terhadap hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.

4. Perkembangan Perhutanan Sosial di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan alokasi 12,7 juta hektare kawasan hutan

untuk program perhutanan sosial²⁹. Hingga tahun 2024, program ini telah mengalami berbagai perkembangan, termasuk peningkatan jumlah izin pengelolaan hutan sosial serta dukungan pendampingan teknis, pemberian bantuan permodalan, dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Meski demikian, tantangan di lapangan masih cukup besar, seperti kapasitas masyarakat yang terbatas, akses pasar yang sulit, konflik tenurial, dan minimnya pendampingan berkelanjutan.

5. Relevansi Perhutanan Sosial di HKm Bukit Sultan, Aceh Besar

Di kawasan HKm Bukit Sultan, Aceh Besar, program perhutanan sosial menjadi strategi penting untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis komunitas. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya bertujuan mengurangi deforestasi, tetapi juga memperkuat mata pencaharian lokal melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan usaha ekonomi berbasis hutan.

Pendampingan intensif dari lembaga seperti World Resources Institute (WRI) Indonesia berperan penting dalam membangun kapasitas teknis, memperkuat kelembagaan kelompok, serta memastikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan hutan sosial di kawasan tersebut.

a. Anggota kelompok HKm

Berdasarkan penelusuran informasi terkini, jumlah pasti anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, Aceh Besar, belum tersedia secara publik dalam sumber resmi. Namun, program perhutanan sosial di kawasan ini aktif didampingi oleh World

²⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), "Perkembangan Program Perhutanan Sosial", 2024.

Resources Institute (WRI) Indonesia, dengan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pelestarian hutan.

Untuk memperoleh data spesifik mengenai jumlah anggota KPS di HKm Bukit Sultan, disarankan untuk mengakses Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPS) Aceh melalui situs resmi sips.acehprov.go.id. Situs ini menyediakan informasi terkini tentang kelompok perhutanan sosial di Aceh, termasuk data keanggotaan dan kegiatan terkait.

Sebagai gambaran, dalam peluncuran SIPS Aceh pada Desember 2024, tercatat kehadiran sekitar 150 peserta yang mewakili berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari kabupaten/kota di Aceh, termasuk Aceh Besar³⁰, Meskipun data ini tidak spesifik untuk HKm Bukit Sultan, hal ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dari wilayah tersebut dalam program perhutanan sosial.

Berikut adalah Tabel 2.1 Jumlah Anggota Kelompok Perhutanan Sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong yang dapat digunakan dalam laporan atau skripsi yang membahas jumlah anggota kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan.

Tabel 2.1 Jumlah Anggota Kelompok Perhutanan Sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong

No	Nama Kelompok	Jenis Skema	Jumlah Anggota Laki-laki	Jumlah Anggota Perempuan	Total
1	HKm HKm Bukit Sultan	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	25	6	31

³⁰ Acehkini.co system informasi perhutanan social di aceh diakses April 2025
<https://acehkini.id/sistem-informasi-perhutanan-sosial-di-aceh-diluncurkan/>

Data SK RKUPS HKm Bukit Sultan (2023)

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai distribusi pendidikan anggota KPS di HKm Bukit Sultan, disarankan untuk mengakses data melalui Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPS) Aceh di <https://sips.acehprov.go.id/>. Situs ini menyediakan informasi terkait kelompok perhutanan sosial di Aceh, termasuk data keanggotaan dan kegiatan terkait.

D. World Resources Institute (WRI) Indonesia

World Resources Institute (WRI) Indonesia adalah lembaga kajian independen yang berkomitmen untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Didirikan dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, WRI Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga multilateral, dan kelompok masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi praktis yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan memastikan kelestarian alam di Indonesia³¹.

1. Fokus Utama WRI Indonesia

WRI Indonesia berfokus pada lima tantangan mendesak:

- a. Hutan dan Penggunaan Lahan: Mendukung pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan melalui penelitian dan analisis berbasis data.
- b. Iklim: Mendorong aksi iklim melalui pengurangan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- c. Energi: Memfasilitasi transisi menuju energi bersih dan efisien.
- d. Kota dan Transportasi: Mempromosikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan sistem transportasi yang ramah lingkungan.

³¹ <https://wri-indonesia.org/id/about/history> diakses April 2025

- e. Kelautan: Melindungi ekosistem laut dan pesisir serta mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan³².

2. Peran WRI Indonesia dalam Perhutanan Sosial

Dalam konteks perhutanan sosial, WRI Indonesia berperan aktif dalam:

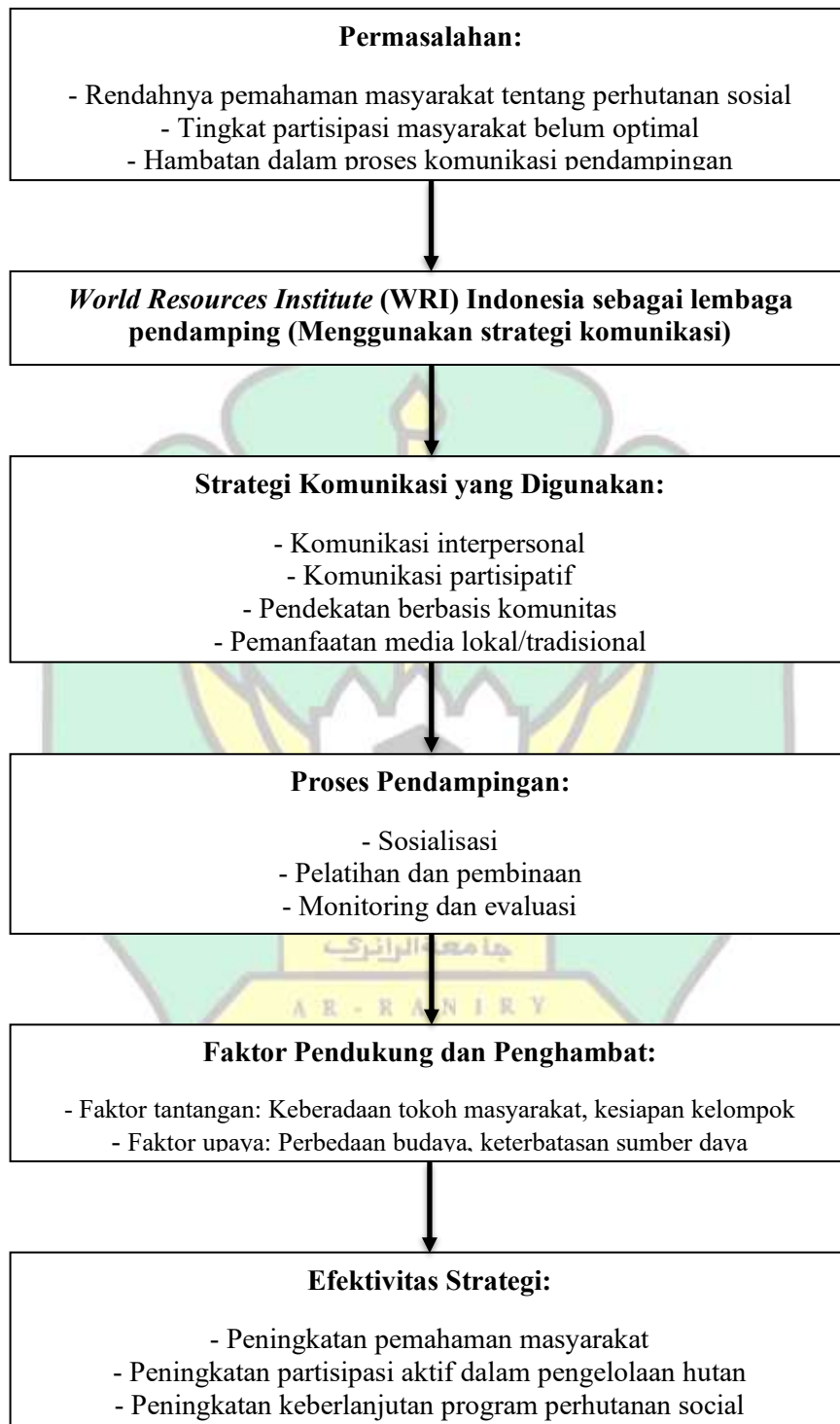
- a. Pendampingan Masyarakat: Mendukung kelompok masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas.
- b. Penyediaan Data dan Analisis: Menyediakan informasi dan analisis berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan hutan.
- c. Advokasi Kebijakan: Mendorong kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Melalui pendekatan ini, WRI Indonesia berkontribusi dalam memperkuat kapasitas lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan di Indonesia.

³² <https://wri-indonesia.org/id/tentang>? Diakses April 2025

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran yang digunakan



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi yang diterapkan oleh World Resources Institute (WRI) dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, Aceh Besar. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial secara holistik, berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para informan yang terlibat langsung dalam program pendampingan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi dirancang, diterapkan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi selama proses pendampingan kelompok perhutanan sosial. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program perhutanan sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah binaan dalam program perhutanan sosial yang didampingi oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai strategi komunikasi dalam pendampingan kelompok masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga pengumpulan data lapangan dalam rentang waktu bulan Maret hingga Juni 2025. Tahap-tahap penelitian meliputi:

- a. Penyusunan instrumen penelitian (Januari 2025)
- b. Pengumpulan data (Januari-April 2025)
- c. Analisis data dan penulisan laporan (April 2025)

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam proses pendampingan program perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan Lamtanjong, Aceh Besar. Mereka terdiri dari:

- a. Staf atau fasilitator dari *World Resources Institute (WRI) Indonesia* yang bertugas mendampingi kelompok masyarakat.
- b. Anggota kelompok perhutanan sosial yang menjadi sasaran program pendampingan.
- c. Tokoh masyarakat lokal yang berperan penting dalam proses sosialisasi dan penerimaan program di tingkat komunitas.

2. Obkjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi yang diterapkan oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial. Fokus utama penelitian adalah mengkaji:

- a. Bentuk, metode, dan media komunikasi yang digunakan.
- b. Pola hubungan dan interaksi antara pendamping dan masyarakat.
- c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas komunikasi.

- d. Dampak strategi komunikasi terhadap tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data-data penting yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk strategi komunikasi yang digunakan WRI, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas komunikasi terhadap kelompok perhutanan sosial.

2. Bagian Data

Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, ataupun bagan Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti melihat pola hubungan antar temuan dan memahami gambaran besar dari proses pendampingan dan strategi komunikasi yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah penyajian data, peneliti melakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan sementara. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui proses pengecekan ulang data, triangulasi sumber, dan konfirmasi kepada informan (member check), untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar valid dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

E. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, keabsahan data dijaga dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu. Ada beberapa bentuk triangulasi yang digunakan:

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan dan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti staf WRI, anggota kelompok perhutanan sosial, dan tokoh masyarakat.
- b. Triangulasi Teknik: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperkuat keakuratan informasi.
- c. Triangulasi Waktu: Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

2. Member Check

Member check dilakukan dengan meminta informan untuk memeriksa kembali hasil wawancara atau interpretasi yang telah dibuat peneliti. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang ditulis dan dianalisis benar-benar sesuai dengan maksud dan pengalaman informan.

3. Peer Debriefing

Peneliti mendiskusikan proses dan temuan penelitian dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran. Ini bertujuan untuk mengurangi subjektivitas peneliti dan memperkuat validitas data.

4. Deskripsi Rinci (Thick Description)

Peneliti menyajikan gambaran yang rinci dan mendalam mengenai latar belakang, proses komunikasi, dan konteks sosial budaya yang mempengaruhi program pendampingan. Dengan deskripsi rinci, pembaca dapat memahami konteks penelitian secara menyeluruh dan menilai tingkat kepercayaan hasil penelitian.

5. Jenis Penelitian

Peneliti menyajikan gambaran yang rinci dan mendalam mengenai latar belakang, proses komunikasi, dan konteks sosial budaya yang mempengaruhi program pendampingan. Dengan deskripsi rinci, pembaca dapat memahami konteks penelitian secara menyeluruh dan menilai tingkat kepercayaan hasil penelitian.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Persiapan Penelitian

- a. Menyusun proposal penelitian.
- b. Melakukan studi literatur terkait teori komunikasi pembangunan, strategi komunikasi, komunikasi lingkungan, dan perhutanan sosial.
- c. Mengurus surat izin penelitian dari kampus dan instansi terkait.

2. Penentuan Informan

- a. Menentukan informan penelitian berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan

terlibat langsung dalam program pendampingan WRI Indonesia di HKm HKm Bukit Sultan, Lamtanjong.

- b. Informan meliputi staf WRI, anggota kelompok perhutanan sosial, dan tokoh masyarakat.

3. Pengumpulan Data

- a. Melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih.
- b. Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pendampingan dan komunikasi di lapangan.
- c. Mengumpulkan dokumentasi seperti laporan kegiatan, foto, serta materi komunikasi.

4. Analisis Data

Melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menggunakan model analisis interaktif.

5. Uji Keabsahan Data

- a. Melakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
- b. Melakukan member check kepada informan.
- c. Diskusi hasil awal dengan pembimbing atau rekan sejawat (peer debriefing).

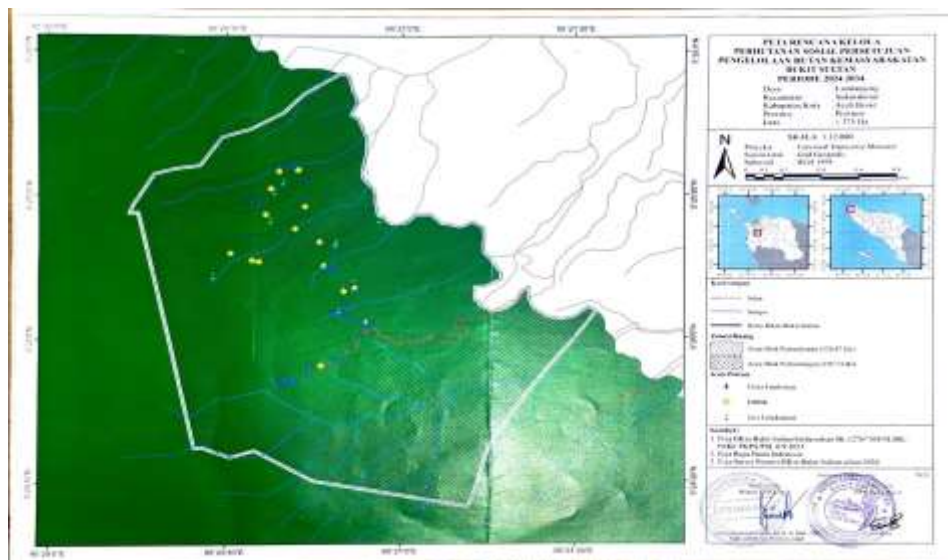
6. Penyusunan Laporan Penelitian

- a. Menulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi berdasarkan temuan dan analisis.
- b. Melakukan revisi sesuai arahan dosen pembimbing.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian, Desa Lamtanjong, Suka Makmur, Aceh Besar



Sumber: <https://zuheimiaceh.blogspot.com/2011/11/aceh-besar.html>

HKm Bukit Sultan yang terletak di Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah perhutanan sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM). Kawasan ini menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan³³

Secara geografis, HKm Bukit Sultan berada dalam kawasan perbukitan dengan ketinggian bervariasi antara 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut.

³³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Perhutanan Sosial di Indonesia: Strategi dan Implementasi*, Jakarta: KLHK, 2022, hlm. 45.

“Keterbatasan infrastruktur jalan, khususnya saat musim hujan, seringkali menghambat mobilitas baik bagi pendamping maupun anggota kelompok masyarakat”³⁴.

Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Meskipun menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, HKm Bukit Sultan menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya dalam hal hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil hutan bukan kayu adalah produk hutan selain kayu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa harus merusak struktur ekosistem hutan itu sendiri. Di HKm Bukit Sultan, jenis HHBK yang menjadi andalan antara lain madu hutan, rotan, tanaman obat tradisional, dan beberapa jenis buah-buahan hutan yang bernilai ekonomi tinggi.³⁵

Produksi madu hutan, misalnya, telah menjadi salah satu sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat setempat. Madu yang dihasilkan dari hutan alami ini memiliki nilai jual yang cukup baik, terutama karena tren permintaan terhadap produk organik dan alami yang meningkat di pasar lokal maupun nasional.³⁶ Selain itu, rotan dari HKm Bukit Sultan memiliki kualitas yang memenuhi standar industri kerajinan tangan, sehingga menjadi komoditas potensial untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan keterampilan dan penguatan akses pasar.

Tidak hanya itu, Pohon Aren Nira juga banyak ditemukan di daerah ini selain daripada tempat dan spot wisata³⁷. Pengelolaan dan budidaya tanaman obat

³⁴ Wawancara dengan Koordinator dan sekretaris Kelompok Perhutanan Sosial HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, 12 April 2025.

³⁵ Data Laporan Tahunan Kelompok HKm HKm Bukit Sultan, 2024.

³⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, *Statistik Perdagangan Produk Hasil Hutan 2024*, Banda Aceh: BPS Aceh, 2024, hlm. 15.

³⁷ Hasil Observasi Lapangan, HKm Bukit Sultan, 11 Februari 2025.

secara berkelanjutan juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus mengeksploitasi kayu dari hutan.

Dalam konteks ekonomi, Meski belum secara signifikan pengembangan HHBK di HKm HKm Bukit Sultan memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi masyarakat³⁸. Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi, aktivitas ini juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dengan adanya peluang ekonomi yang berbasis kelestarian, masyarakat didorong untuk tidak lagi melakukan praktik-praktik merusak seperti penebangan liar, melainkan beralih ke pola pemanfaatan hasil hutan yang lestari.

Program pendampingan yang dilakukan oleh lembaga seperti World Resources Institute (WRI) Indonesia berperan penting dalam menggali potensi ini. Melalui pendekatan partisipatif, WRI membantu masyarakat mengidentifikasi, mengelola, dan memasarkan produk HHBK secara lebih terstruktur. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga membangun jaringan pemasaran dan memperkenalkan inovasi produk berbasis hasil hutan alami.³⁹

Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan fisik berupa aksesibilitas yang terbatas, potensi hasil hutan bukan kayu di HKm Bukit Sultan membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi ini bergantung pada sinergi antara masyarakat, pendamping, dan dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif.

³⁸ Mulyadi Subri, *Ekonomi Kehutanan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2017, hlm. 67.

³⁹ World Resources Institute Indonesia, *Laporan Tahunan Program Perhutanan Sosial Aceh Besar*, Jakarta: WRI Indonesia, 2024, hlm. 34.

1. Karakteristik Geografis HKm Bukit Sultan

Secara geografis, HKm Bukit Sultan terletak di wilayah perbukitan yang terletak di sekitar Kecamatan Lamtanjong, Kabupaten Aceh Besar, yang memiliki topografi berbukit dan beragam tipe hutan. Kawasan ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai kecil yang menjadi bagian dari ekosistem hutan tropis dataran tinggi. Keberadaan hutan yang luas di kawasan ini memberikan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik dari hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK)⁴⁰.

Namun, keberadaan kawasan ini yang terletak di wilayah perbukitan juga membawa tantangan, terutama terkait dengan aksesibilitas yang sulit. Jalan menuju kawasan ini masih terbatas dan seringkali tidak dapat diakses dengan kendaraan biasa, sehingga menyebabkan frekuensi pendampingan dan pemantauan menjadi terbatas. Meskipun demikian, potensi alam yang dimiliki oleh HKm Bukit Sultan, seperti hasil hutan madu, rotan, dan tanaman obat, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.⁴¹

Selain itu, HKm Bukit Sultan memiliki iklim tropis yang mendukung keberagaman flora dan fauna. Kawasan ini juga sering mengalami curah hujan yang tinggi, sehingga pertumbuhan vegetasi hutan sangat subur. Kondisi iklim dan topografi ini sangat mendukung pengembangan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.⁴²

⁴⁰ SIPS Aceh, “Kondisi Geografis dan Potensi Alam HKm Bukit Sultan”, 2024.

⁴¹ World Resources Institute Indonesia, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di HKm Bukit Sultan*, Jakarta: WRI Indonesia, 2024, hlm. 14.

⁴² Kontras Aceh, “Karakteristik Lingkungan dan Potensi Alam HKm Bukit Sultan”, 2024.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang tinggal di sekitar HKm Bukit Sultan umumnya merupakan petani dan pengusaha kecil yang bergantung pada hasil alam. Sebagian besar dari mereka telah lama mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengambil kayu bakar, rotan, dan madu hutan. Akan tetapi, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan sering kali menyebabkan praktik eksploitasi berlebihan, yang pada gilirannya merusak ekosistem hutan.

Sebelum adanya program perhutanan sosial, masyarakat lebih cenderung mengeksploitasi hutan tanpa memperhatikan keberlanjutannya, yang mengarah pada deforestasi dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, program perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh WRI Indonesia di HKm Bukit Sultan bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal mengenai teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih terorganisir. Salah satu aspek penting dalam program ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang lebih ramah lingkungan.⁴³

3. Anggota Kelompok Hkm HKm Bukit Sultan

Sampai dengan April 2025, anggota kelompok HKm HKm Bukit Sultan berjumlah 31 orang semenjak diterbitkannya surat keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor; SK. 12767 / MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan HKm Bukit Sultan Seluas 375 Hektar⁴⁴.

⁴³ Kilas Aceh, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di HKm Bukit Sultan”, 2024.

⁴⁴ 12767 / MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2024 dokumen Resmi

Gambar 4.2 Lampiran SK HKm Bukit Sultan

- 9 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN BUKIT SULTAN SELUAS ± 375 (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI GAMPONG LAMTANJONG KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH
 NOMOR : SK. 12767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
 TANGGAL : 29 September 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN BUKIT SULTAN PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN GAMPONG LAMTANJONG KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1.	Abdullah	L	1106060504640003	Lambirah
2.	Aidil Farhan	L	1106062003000002	Lamtanjong
3.	Badrul Salya	L	1106060710810002	Dilib Bukit
4.	Dara Fadila	P	1106066505010003	Lamtanjong
5.	Edi Akhlar	L	1106061210830001	Lambirah
6.	Edi Mulia	L	1106060407840004	Lamtanjong
7.	Fendi Andria	L	1106061209990002	Lamtanjong
8.	Fera Yanti	P	1106064310960001	Lamtanjong
9.	Irwan	L	1106172911740001	Reuleung Karieng
10.	Juliah	P	1106065004690001	Lamtanjong
11.	M. Daud	L	1106060107620006	Tampok Blang
12.	M. Jabir	L	1106061207040001	Lamtanjong
13.	M. Yasir	L	1106181009000002	Blang Mire
14.	Muallim	L	1106060806560002	Lamtanjong
15.	Muhari	L	1106060702920001	Lambirah
16.	Mursalin	L	1108010107890468	Lambirah
17.	Nazarullah	L	1106060810960001	Lamtanjong
18.	Nurlistiana	P	1106065808900001	Luthu Dayah Krueng
19.	Nursetiana	P	1106065110960002	Lamtanjong

20. Riski Ananda Saputra...

- 10 -

20.	Riski Ananda Saputra	L	1106061708930005	Lamtanjong
21.	Risma	P	1106065001900002	Lamtanjong
22.	Riami Hadi	L	1106061709860001	Lamtanjong
23.	Safrizal	L	1106062709770002	Lambirah
24.	Saiful Hendri	L	1106062510850003	Lambirah
25.	Satria Saputra	L	1106060612000001	Lambirah
26.	Surahman Habibi	L	1106060304860001	Lampas Engking
27.	Syawaluddin	L	1106060902980001	Luthu Dayah Krueng
28.	Teuku Suryansyah	L	1171051006540001	Batoh
29.	Wijaya Ramadhan	L	1106061906840001	Lambirah
30.	Yuswardi	L	1106061901720001	Lambirah Bak Mee
31.	Zulfitra	L	1106062909890002	Lam Lheu

SK HKm Bukit Sultan, 2023

5. WRI Indonesia sebagai Mitra Strategis

World Resources Institute (WRI) Indonesia berperan sebagai mitra strategis dalam mendampingi kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan. WRI Indonesia telah lama dikenal sebagai organisasi yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat

lokal dalam pengelolaan hutan. Melalui program perhutanan sosial ini, WRI Indonesia memberikan pendampingan berupa pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat di HKm Bukit Sultan.

Pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap program. WRI Indonesia juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program perhutanan sosial. Kolaborasi ini mencakup penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan hutan yang ramah lingkungan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil hutan secara berkelanjutan. Selain itu, WRI Indonesia juga membantu masyarakat dalam mengakses pasar bagi hasil hutan bukan kayu, seperti madu dan rotan, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka⁴⁵

Berikut adalah Rencana Kegiatan Pendampingan WRI Indonesia yang bisa digunakan dalam skripsi atau laporan penelitian yang membahas strategi *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam pendampingan kelompok perhutanan sosial.

Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Pendampingan WRI Indonesia untuk Kelompok Perhutanan Sosial

No	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
1	Sosialisasi Program Perhutanan Sosial	Memberikan pemahaman tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme perhutanan sosial kepada anggota kelompok.	Mei-Juni 2024	Masyarakat lokal, kelompok KPS	Tingkat pemahaman masyarakat meningkat, peserta aktif dalam diskusi.

⁴⁵ Antara News Aceh, "WRI Indonesia dalam Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial di HKm Bukit Sultan", 2024.

2	Pelatihan Manajemen Sumber Daya Alam	Pelatihan mengenai teknik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Juni 2024	Anggota KPS, fasilitator WRI	Peningkatan keterampilan manajerial dan teknis pengelolaan alam.
3	Pendampingan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan	Membantu kelompok dalam menyusun rencana kerja untuk kegiatan perhutanan sosial yang terencana dan berkelanjutan.	Juli-Agustus 2024	Kelompok KPS dan pemangku kepentingan lokal	Rencana kerja yang disetujui dan diimplementasikan sesuai jadwal.
4	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Alam	Pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.	November 2024	Anggota KPS, kelompok usaha	Usaha ekonomi berbasis alam yang berkelanjutan dan meningkatnya pendapatan kelompok.
5	Penguatan Kapasitas Komunikasi	Mengadakan workshop komunikasi untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam menyampaikan pesan kepada publik.	Juli 2024	Anggota KPS, fasilitator WRI	Peningkatan kemampuan komunikasi anggota dalam menyampaikan pesan dan laporan
6	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat.	Desember 2024	Anggota KPS, pemerintah lokal	Terlaksananya evaluasi yang mencakup data partisipasi dan dampak sosial.

Tabel ini menggambarkan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh WRI Indonesia untuk mendampingi kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong, Aceh Besar. Setiap kegiatan memiliki deskripsi singkat, waktu pelaksanaan, sasaran yang dituju, dan indikator keberhasilan untuk menilai efektivitas kegiatan.

World Resources Institute (WRI) Indonesia, dalam mendampingi kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Aceh Besar, mengimplementasikan sejumlah strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, serta observasi langsung, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi WRI Indonesia mencakup beberapa elemen kunci, yaitu sosialisasi, edukasi, dan pelatihan teknis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Malahayati mengatakan.

“Dalam proses penyampaian program perhutanan sosial, kami tidak serta-merta langsung memberikan materi atau informasi. Kami terlebih dahulu melakukan pendekatan personal dengan tokoh-tokoh masyarakat, lalu melakukan pertemuan-pertemuan kecil untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, barulah kami masuk ke tahap sosialisasi program secara menyeluruh⁴⁶.”

Malahayati menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang digunakan bersifat terbuka dan adaptif. WRI berusaha menyampaikan informasi melalui berbagai cara, termasuk diskusi kelompok terarah, presentasi visual, hingga pendampingan langsung di lapangan. Pesan-pesan program juga dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat.

⁴⁶ Wawancara dengan Malahayati, Database Assistant WRI Indonesia, 11 Maret 2025

Selain itu, WRI juga menggunakan data spasial dan visualisasi peta untuk menjelaskan batas-batas wilayah hutan kemasyarakatan dan potensi yang dapat dikelola secara legal oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya informatif tetapi juga edukatif.

“Masyarakat lebih paham ketika kami menunjukkan data spasial secara langsung, dibandingkan hanya mendengar penjelasan verbal. Jadi kami tunjukkan peta interaktif, foto udara, dan ilustrasi lainnya untuk menjelaskan pentingnya menjaga dan mengelola hutan secara legal⁴⁷.”

Dengan demikian, strategi komunikasi WRI menggabungkan unsur partisipasi masyarakat, media visual, dan edukasi bertahap yang membangun kesadaran kritis terhadap pentingnya perhutanan sosial.

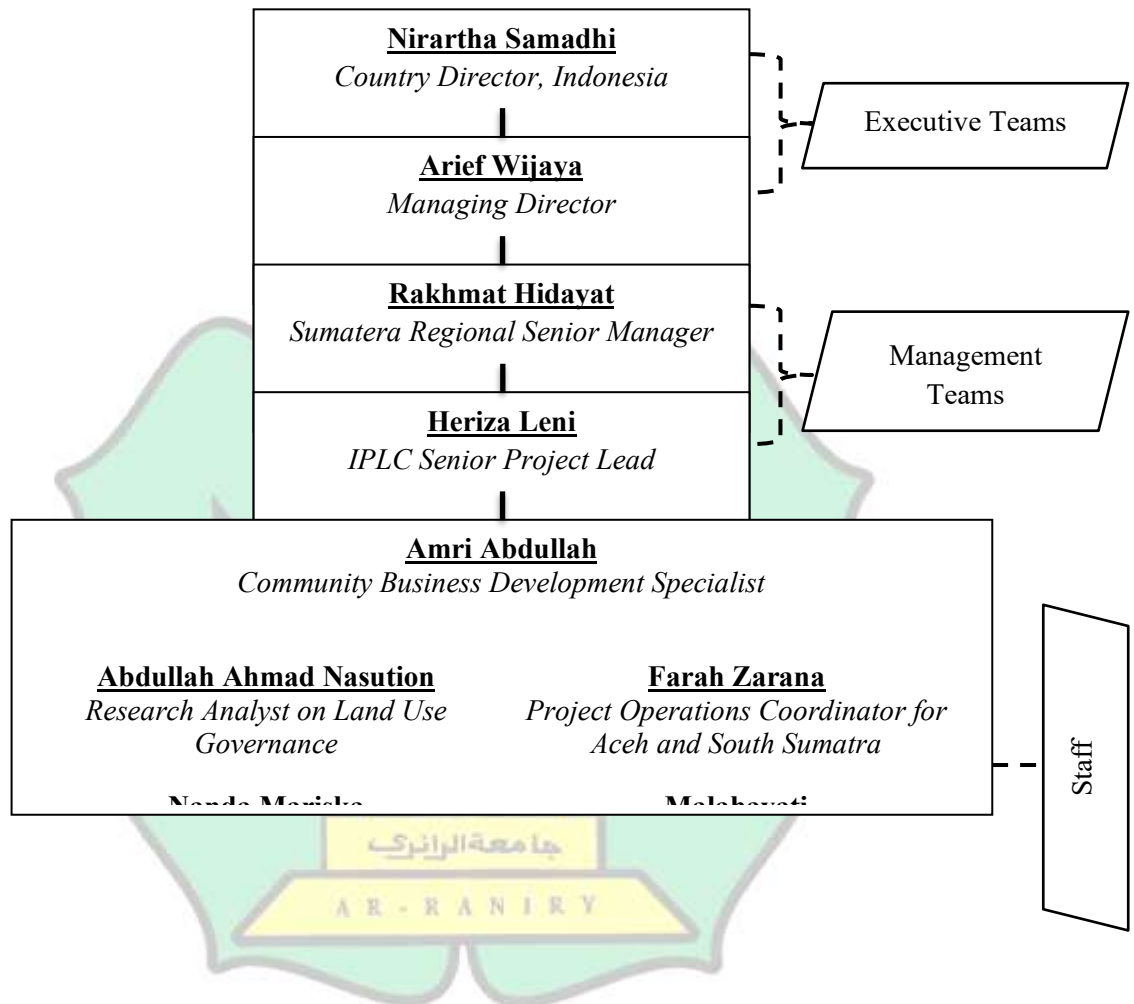
B. Gambaran Umum World Resources Institute (WRI) Indonesia

World Resources Institute (WRI) Indonesia adalah organisasi riset global yang berfokus pada isu-isu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, dan tata kelola sumber daya alam. WRI Indonesia memiliki peran strategis dalam mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satu program unggulan WRI Indonesia adalah mendukung perhutanan sosial, yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lebih berkelanjutan. Dalam konteks perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong Aceh Besar, WRI berperan penting dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi kelompok tani hutan dan menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan.

⁴⁷ *Ibid*,h.50

1. Struktur Organisasi World Resources Institute Regional Aceh

Gambar 4.3 Struktur Organisasi World Resources Institute Regional Aceh Tahun 2025



Sumber: *World Resources Institute (WRI) Indonesia.2025*

World Resources Institute (WRI) Indonesia adalah lembaga riset global yang berfokus pada isu-isu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, perubahan iklim, energi, dan tata kelola sumber daya alam. Sebagai bagian dari WRI Global yang berbasis di Washington D.C., WRI Indonesia menjalankan

berbagai program adaptif di tingkat nasional dan lokal, termasuk di Provinsi Aceh.

a. Di Aceh, WRI Indonesia aktif mendukung program perhutanan sosial dengan tujuan utama:

- 1) Memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan.
- 2) Mendorong model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 3) Memperkuat hak-hak tenurial masyarakat atas kawasan hutan.

b. Program WRI di Aceh khususnya difokuskan pada:

- 1) Pendampingan Teknis: Melatih kelompok tani hutan dalam pengelolaan hutan lestari, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengembangan usaha berbasis kehutanan.
- 2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Membantu pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengelola hutan.
- 3) Penyusunan Perencanaan Partisipatif: Membimbing masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Usaha Perhutanan Sosial (RKUPS) dan dokumen tata kelola lainnya.
- 4) Kampanye Komunikasi Lingkungan: Melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye terkait pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.

c. Dampak Sosial-Ekonomi

Berikut adalah Dampak Sosial-Ekonomi dari Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial oleh WRI Indonesia. Tabel ini akan menggambarkan hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh WRI dalam

meningkatkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial di HKM Bukit Sultan, Lamtanjong, Aceh Besar.

Tabel 4.2 Dampak Sosial-Ekonomi dari Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial

No	Aspek	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan	Dampak yang Terjadi
1	Peningkatan Pendapatan	Memberikan pemahaman tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme perhutanan sosial kepada anggota kelompok.	Pendapatan meningkat melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (misalnya, hasil hutan bukan kayu, wisata alam).	Meningkatnya pendapatan keluarga, terutama melalui pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
2	Keterampilan Pengelolaan Hutan	Kurangnya pengetahuan teknis mengenai pengelolaan hutan dan pemanfaatannya.	Anggota kelompok memperoleh keterampilan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan silvikultur dan konservasi tanah.	Peningkatan keterampilan anggota dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara bijak.
3	Akses terhadap Layanan Keuangan	Terbatasnya akses ke kredit atau lembaga keuangan untuk pengembangan usaha.	Akses ke layanan keuangan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis alam.	Meningkatnya akses anggota kelompok terhadap modal usaha dan kredit untuk pengembangan usaha berbasis alam.
4	Kesejahteraan Sosial	Tingkat kemiskinan relatif tinggi, dengan sedikitnya	Program pemberdayaan sosial yang	Peningkatan kualitas hidup anggota kelompok

		program sosial untuk masyarakat.	membantu meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan.	melalui akses lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan.
5	Pemberdayaan Perempuan	Peran perempuan terbatas dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan	Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan usaha berbasis alam.	Meningkatnya peran perempuan dalam pengelolaan kelompok dan kegiatan ekonomi keluarga
6	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	Keputusan lebih sering diambil oleh kelompok terbatas (biasanya kepala keluarga atau pemimpin masyarakat).	Partisipasi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan meningkat, termasuk kelompok perempuan dan pemuda.	Peningkatan demokratisasi dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok.

Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis penguatan kapasitas lokal, WRI berusaha mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara lestari. Di wilayah HKM Bukit Sultan, Lamtanjong, WRI menjadi salah satu organisasi yang mendampingi kelompok perhutanan sosial sejak tahap awal, mulai dari proses pengajuan izin hingga pengembangan kapasitas kelembagaan dan usaha produktif masyarakat.

World Resources Institute (WRI) Indonesia mulai aktif beroperasi di Provinsi Aceh sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pasca konflik dan bencana tsunami tahun 2004. Kehadiran WRI di Aceh diawali dengan keterlibatan dalam program-program pembangunan berbasis lingkungan hidup dan restorasi kawasan hutan, mengingat Aceh memiliki salah satu

kawasan hutan tropis terbesar dan paling penting di Indonesia, yaitu Kawasan Ekosistem Leuser.

d. Masuknya WRI ke Aceh antara lain:

- 1) Tahun 2015-2016: WRI Indonesia mulai melakukan kajian dan pemetaan awal terkait kondisi tata kelola hutan dan lahan di Aceh, berfokus pada identifikasi tantangan tenurial dan potensi perhutanan sosial.
- 2) Tahun 2017: WRI memperkuat kehadirannya di Aceh melalui program kolaboratif dengan mitra lokal dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung agenda perhutanan sosial yang menjadi prioritas nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- 3) Tahun 2018–sekarang: WRI secara aktif mendampingi kelompok-kelompok masyarakat di berbagai wilayah Aceh, Khusus HKm Bukit Sultan mulai dari 2022, dalam proses pengajuan izin perhutanan sosial, penyusunan Rencana Kerja Usaha Perhutanan Sosial (RKUPS), serta pemberdayaan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Melalui pendekatan partisipatif, berbasis data, dan kolaboratif, WRI Indonesia di Aceh mengutamakan prinsip penguatan hak masyarakat atas pengelolaan hutan serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Kegiatan WRI di Aceh tidak hanya berfokus pada program di lapangan, tetapi juga mendorong advokasi kebijakan di tingkat daerah untuk mendukung perhutanan sosial sebagai salah satu solusi pengelolaan hutan berkelanjutan.

Menurut Malahayati dari wawancara yang dilakukan peneliti, pendekatan partisipatif dilakukan dengan membuka ruang dialog yang setara antara tim WRI Indonesia dan masyarakat. Proses ini dimulai dengan membangun kepercayaan melalui pertemuan informal, dilanjutkan dengan

diskusi kelompok, dan kemudian musyawarah terbuka untuk menyusun rencana kerja bersama. Malahayati mengatakan.

“Kami tidak langsung menyampaikan materi, tapi mulai dari mendengar dulu. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka alami, baru kami sesuaikan pendekatannya⁴⁸.”

Ahmad Nasution sebagai fasilitator lapangan menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ia menyebut bahwa dalam setiap kegiatan, masyarakat dilibatkan dalam identifikasi masalah, pemetaan potensi hutan, hingga penentuan jenis kegiatan rehabilitasi atau pengembangan ekonomi berbasis hutan. Ia menambahkan.

“Kami fasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, bahkan kalau mereka tidak setuju pun itu kami catat. Jadi pendekatan partisipatif ini bukan hanya mendengar, tapi memberi ruang untuk memutuskan bersama⁴⁹.”

Partisipasi juga diwujudkan dalam bentuk pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok tani hutan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi kegiatan. Hal ini menjadikan komunikasi yang terbangun tidak bersifat satu arah, tetapi merupakan hasil interaksi yang dinamis dan terus berkembang.

Melalui pendekatan partisipatif, WRI (*World Resources Institute*) Indonesia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Pendekatan ini menciptakan ruang dialog yang terbuka antara pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak secara langsung, WRI Indonesia membangun pola komunikasi dua arah yang efektif dan inklusif,

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Malahayati Selaku (*Database Assisten WRI*) Pada hari Kamis, 11 Maret 2025

⁴⁹ Wawancara dengan Ahmad Nasution Selaku (*Research Analyst on Land Use Governance WRI*) pada hari Sabtu, 13 Maret 2025

yang pada akhirnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Lebih dari sekadar keterlibatan teknis, pendekatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Melalui proses pembelajaran bersama dan penguatan kapasitas, masyarakat tidak hanya memahami manfaat ekologis dari pelestarian hutan, tetapi juga menyadari peran strategis mereka dalam menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, WRI Indonesia tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga menanamkan fondasi perubahan jangka panjang yang berpihak pada keberlanjutan.

3. Program-program WRI di Aceh Besar

Gambar 4.4 Poster salah satu program WRI Indonesia



Sumber; Instagram *World Resources Institute (WRI) Indonesia* 2024

a. Program “Muda Melangkah”

Pada November 2022, WRI Indonesia mengadakan program pelatihan “Muda Melangkah” yang diikuti oleh anggota kelompok

perhutanan sosial dari beberapa kabupaten di Aceh, termasuk HKm Bukit Sultan. Program ini bertujuan untuk⁵⁰:

- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang isu gender, demokrasi, perubahan iklim, dan kepemimpinan muda.
- 2) Melatih peserta dalam jurnalisme warga untuk mengadvokasi isu perhutanan sosial melalui media.
- 3) Memberikan pengalaman langsung melalui kunjungan lapangan ke lokasi perhutanan sosial.⁵¹

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran generasi muda dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

b. Pelatihan Menulis dan Jurnalisme Warga

Sebagai tindak lanjut dari program “*Muda Melangkah*”, WRI Indonesia bersama Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh menyelenggarakan pelatihan menulis bagi masyarakat yang peduli terhadap perhutanan sosial. Tujuan dari pelatihan ini adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendokumentasikan dan menyebarkan informasi tentang kegiatan perhutanan sosial.
- 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam advokasi dan penyebaran informasi melalui media sosial dan platform lainnya.

⁵⁰ https://sips.acehprov.go.id/publik/berita_detail/2024/02/wri-indonesia-gelar-program-muda-melangkah-untuk-anggota-perhutanan-sosial-di-aceh? Diakses April 2025

⁵¹ <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/2024-03/E-Book%20Kumpulan%20Karya%20Jurnalisme%20Warga%20Muda%20Melangkah%20Aceh%202022.pdf>? Diakses April 2025

Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengunjungi lokasi-lokasi perhutanan sosial di Aceh, termasuk Aceh Besar⁵².

c. Forum Pembelajaran “Bergerak dari Tapak”

Pada akhir tahun 2024, WRI Indonesia mengadakan forum pembelajaran bertajuk “*Bergerak dari Tapak*” yang melibatkan peserta dari kelompok perhutanan sosial di Aceh dan Sumatera Barat. Forum ini bertujuan untuk⁵³:

- 1) Berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan perhutanan sosial.
- 2) Memperkuat kelembagaan kelompok perhutanan sosial melalui pendekatan *Gender Equity and Social Inclusion (GESI)*.
- 3) Mendorong kolaborasi antar kelompok dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Program-program tersebut menunjukkan komitmen WRI Indonesia dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di HKm Bukit Sultan, Aceh Besar.

d. Strategi Komunikasi WRI Indonesia di HKm Bukit Sultan

Strategi komunikasi yang dikembangkan oleh WRI Indonesia untuk kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan sangat berfokus pada pemahaman dan penguatan kapasitas kelompok tani hutan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan sumber daya

⁵² <https://wri-indonesia.org/id/events/2024/8/jelajah-perhutanan-sosial-aceh-pelatihan-menulis-untuk-masyarakat-peduli-perhutanan>? Diakses April 2025

⁵³ <https://portalaceh.inews.id/read/536267/wri-indonesia-gelar-learning-forum-orang-muda-begerak-dari-tapak>? Diakses April 2025

alam. Dalam konteks ini, WRI Indonesia menerapkan berbagai pendekatan komunikasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Pendekatan komunikasi yang digunakan mencakup penyuluhan, pendidikan masyarakat, serta pembentukan jaringan komunikasi antar kelompok tani hutan dan pihak terkait lainnya. Selain itu, WRI juga menggunakan berbagai platform, baik itu komunikasi tatap muka maupun melalui media digital, untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, strategi komunikasi yang diterapkan oleh WRI Indonesia mencakup beberapa komponen utama, antara lain: (1) pemetaan pemangku kepentingan, (2) perencanaan pesan yang relevan dan dapat diterima oleh kelompok sasaran, dan (3) penguatan kapasitas komunikasi bagi kelompok tani hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malahayati selaku Database Assistant WRI Indonesia, strategi komunikasi yang digunakan WRI dalam menyampaikan program perhutanan sosial kepada masyarakat HKM Bukit Sultan dilakukan secara bertahap, dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Malahayati mengatakan.

“Dalam proses penyampaian program perhutanan sosial, kami tidak serta-merta langsung memberikan materi atau informasi. Kami terlebih dahulu melakukan pendekatan personal dengan tokoh-tokoh masyarakat, lalu melakukan pertemuan-pertemuan kecil untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, barulah kami masuk ke tahap sosialisasi program secara menyeluruh.”⁵⁴

Malahayati menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang digunakan bersifat terbuka dan adaptif. WRI Indonesia berusaha menyampaikan informasi melalui berbagai cara, termasuk diskusi kelompok terarah, presentasi visual, hingga pendampingan langsung di lapangan. Pesan-pesan

⁵⁴ Ibid.,h. 56

program juga dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat.

Selain itu Malahayati menambahkan, WRI Indonesia juga menggunakan data spasial dan visualisasi peta untuk menjelaskan batas-batas wilayah hutan kemasyarakatan dan potensi yang dapat dikelola secara legal oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya informatif tetapi juga edukatif.

“Masyarakat lebih paham ketika kami menunjukkan data spasial secara langsung, dibandingkan hanya mendengar penjelasan verbal. Jadi kami tunjukkan peta interaktif, foto udara, dan ilustrasi lainnya untuk menjelaskan pentingnya menjaga dan mengelola hutan secara lega.”⁵⁵

Dengan demikian, strategi komunikasi WRI Indonesia menggabungkan unsur partisipasi masyarakat, media visual, dan edukasi bertahap yang membangun kesadaran kritis terhadap pentingnya perhutanan sosial.

4. Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Identifikasi Pesan Kunci

Pemetaan pemangku kepentingan adalah langkah awal yang penting dalam merancang strategi komunikasi. Hal ini melibatkan identifikasi semua pihak yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh program perhutanan sosial, seperti kelompok tani hutan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat setempat. Setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda, sehingga pesan yang disampaikan perlu disesuaikan agar dapat dipahami dan diterima dengan baik.

Di HKm Bukit Sultan, pesan yang disampaikan oleh WRI Indonesia lebih difokuskan pada pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, manfaat ekonomi dari perhutanan sosial, dan bagaimana kelompok tani hutan

⁵⁵ Ibid.,h. 56

dapat mengelola sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab. Salah satu pesan kunci adalah pentingnya keberagaman ekosistem hutan untuk mendukung kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim.

Malahayati menjelaskan bahwa sejak awal pendampingan, tim WRI Indonesia mempelajari terlebih dahulu kondisi sosial budaya masyarakat setempat, termasuk norma adat, sistem kemasyarakatan, serta peran tokoh adat dan agama. Hal ini dilakukan agar komunikasi yang dibangun tidak menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman.

“Kami menyadari bahwa masyarakat di HKM Bukit Sultan punya kearifan lokal yang kuat. Jadi kami tidak bisa masuk dengan pendekatan yang kaku atau terlalu teknis. Kami menyesuaikan gaya komunikasi kami agar lebih bisa diterima.”⁵⁶

Sementara itu, Ahmad Nasution menyampaikan bahwa dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, WRI Indonesia sering melibatkan tokoh adat, perangkat gampong, dan imam masjid sebagai mediator komunikasi. Mereka dianggap lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan melalui mereka akan lebih efektif.

“Kalau kami yang bicara terus, belum tentu didengar. Tapi kalau imam gampong yang menyampaikan pentingnya menjaga hutan lewat ceramah atau khutbah Jumat, itu pengaruhnya lebih kuat.”⁵⁷

Selain itu, pendekatan budaya juga diterapkan dalam bentuk penggunaan bahasa lokal, pemilihan waktu kegiatan yang tidak bertabrakan dengan kegiatan adat atau keagamaan, serta penyampaian pesan menggunakan perumpamaan atau cerita rakyat yang familiar di kalangan masyarakat.

⁵⁶ Ibid.,h. 56

⁵⁷ Ibid.,h. 57

Adaptasi yang dilakukan oleh WRI Indonesia mencerminkan penerapan prinsip komunikasi interkultural yang menghargai keragaman budaya dan nilai-nilai lokal dalam setiap proses pendampingan. Dengan memahami norma, kebiasaan, serta bahasa yang digunakan oleh komunitas setempat, WRI mampu menjalin hubungan yang lebih erat dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. Komunikasi yang sensitif terhadap budaya ini memungkinkan setiap interaksi berlangsung secara setara dan terbuka, sehingga komunitas merasa dihargai dan diperlakukan sebagai mitra sejajar, bukan sekadar objek dari intervensi program.

Selain itu, pendekatan ini juga mengintegrasikan prinsip komunikasi lingkungan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Dengan menggali dan mengangkat kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya alam, WRI mampu merancang strategi yang tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dengan antusias. Pendekatan yang kontekstual ini memperkuat keberterimaan dan keberlanjutan program perhutanan sosial di tingkat tapak, karena masyarakat merasa bahwa program tersebut selaras dengan identitas dan nilai-nilai yang mereka anut. Hasilnya adalah proses pendampingan yang lebih inklusif, efektif, dan berdampak jangka panjang.

- a. Pendekatan Komunikasi Partisipatif

Gambar. 4.5 WRI Melakukan Diskusi dengan kelompok HKM Bukit Sultan



Sumber; *World Resources Institute (WRI) Indonesia*, 2024.

Salah satu prinsip dasar dalam strategi komunikasi WRI Indonesia adalah komunikasi yang bersifat partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan kelompok tani hutan untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam proses komunikasi. Partisipasi ini mencakup keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program komunikasi yang ada.

Di HKm Bukit Sultan, komunikasi partisipatif diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi kelompok terarah (FGD), pelatihan, dan workshop. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kelompok tani hutan tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan advokasi di tingkat lokal.

Selain itu, WRI Indonesia juga mendorong pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan kelompok tani hutan, pemerintah lokal, dan lembaga lainnya untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan perhutanan sosial dan mencari solusi bersama. Proses ini tidak hanya

memperkuat jaringan sosial antar pemangku kepentingan, tetapi juga mempercepat proses adopsi praktik pengelolaan hutan yang lebih baik.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hubungan antarwarga dalam mengelola hutan secara bersama-sama di desa ini terjalin dengan baik dan didasarkan pada prinsip gotong royong serta saling percaya. Bapak Habibi, sebagai Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), menjelaskan bahwa kerjasama antarwarga dalam kelompok sangat penting, terutama dalam hal pembagian tugas, pemeliharaan hutan, dan pengambilan keputusan bersama. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara anggota kelompok sangat mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Bapak Habibi mengaakan bahwa:

“sebagai salah satu anggota kelompok, menambahkan bahwa hubungan antarwarga terasa semakin erat sejak program perhutanan sosial dimulai. Menurutnya, program ini tidak hanya melibatkan warga dalam kegiatan fisik seperti penanaman pohon, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan semua anggota kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pertemuan dan diskusi menjadikan mereka merasa lebih terikat satu sama lain. Bapak Habibi menilai bahwa kegiatan bersama ini turut memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga⁵⁸”.

Sementara itu, Bapak Amu menyatakan bahwa dalam mengelola hutan bersama-sama, terdapat rasa saling mendukung dan membantu antara sesama anggota. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya mungkin ada perbedaan pendapat terkait metode atau pembagian hasil, namun melalui musyawarah, semua perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam praktiknya, anggota kelompok saling membantu, baik dalam hal tenaga maupun informasi terkait dengan pengelolaan hutan. Hal ini

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibuk Rahma Selaku Anggota Kelompok HKm, Anggota HKm. Pada Hari Kamis, 13 Maret 2025

membuat suasana kerja sama terasa lebih harmonis dan memperkuat ikatan sosial antarwarga.

b. Peningkatan Kapasitas Komunikasi Kelompok Tani Hutan

Gambar. 4.6 WRI Indonesia Memberikan Pelatihan Pembuatan Aren kepada kelompok HKm Bukit Sultan



Sumber; *World Resources Institute (WRI), 2024.*

Untuk memastikan strategi komunikasi berjalan efektif, WRI Indonesia juga berfokus pada peningkatan kapasitas komunikasi bagi kelompok tani hutan. Hal ini penting agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada anggota kelompok lainnya, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan luar, seperti pemerintah daerah atau lembaga donor.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan mengenai teknik komunikasi yang baik dan efektif, seperti cara menyampaikan pesan yang persuasif, penggunaan media sosial untuk penyebaran informasi, serta cara-cara lain yang relevan dengan konteks lokal. Dalam pelatihan ini, WRI juga mengajarkan pentingnya pengelolaan informasi yang akurat dan berbasis data dalam komunikasi, agar pesan yang

disampaikan dapat diterima dengan baik dan memotivasi perubahan yang diinginkan. Koordinator kelompok mengatakan.

“Contohnya, masyarakat di HKm Bukit Sultan dilatih dalam teknik pengolahan Air Nira menjadi cuka atau manisan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya jual produk. Selain itu, mereka juga diberikan pelatihan dalam teknik pemasaran yang memungkinkan mereka untuk memasarkan hasil hutan secara lebih luas dan profesional. Dengan meningkatnya kapasitas ini, masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam mengelola dan mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka⁵⁹.”

Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang diterapkan oleh WRI Indonesia dalam pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong Aceh Besar, berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan peningkatan kapasitas komunikasi. Dengan pemetaan pemangku kepentingan yang cermat, penyusunan pesan yang relevan, dan pelatihan komunikasi yang efektif, WRI Indonesia berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari kelompok tani hutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong terciptanya perubahan sosial yang lebih besar di tingkat lokal.

C. Strategi Komunikasi WRI Indonesia dalam Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial di HKm Bukit Sultan

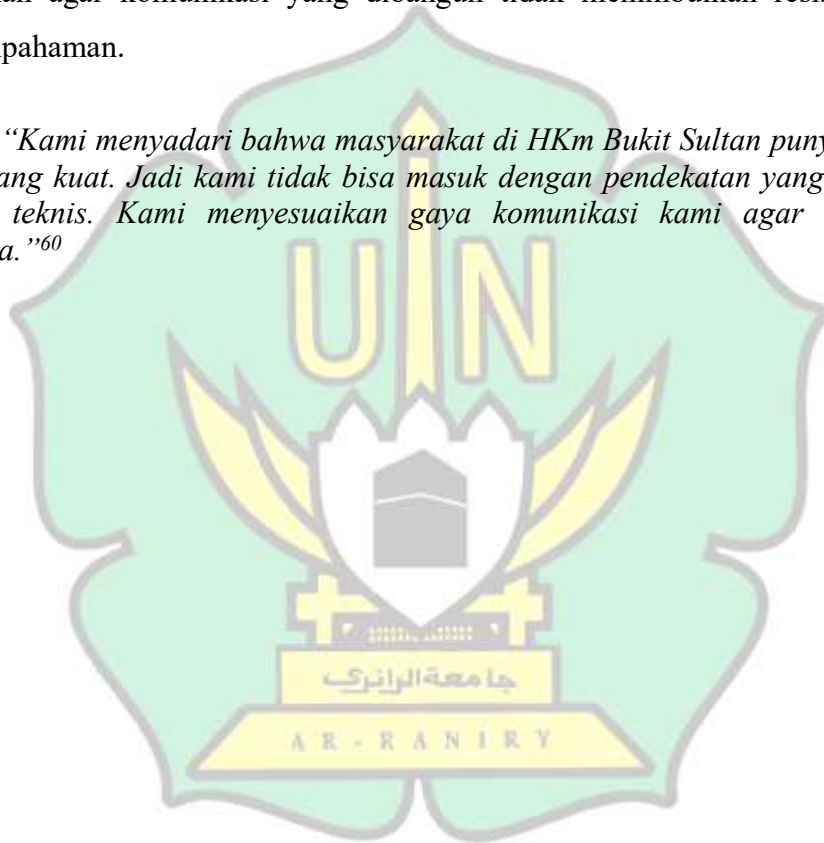
Dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong Aceh Besar, *World Resources Institute (WRI)* Indonesia menerapkan strategi komunikasi pembangunan yang holistik dan partisipatif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi aktor aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Dalam konteks ini, WRI Indonesia

⁵⁹ Wawancara dengan Koordinator Kelompok Perhutanan Sosial HKm Bukit Sultan. Pada Hari Selasa, 25 Maret 2025.

memanfaatkan beragam metode komunikasi yang melibatkan interaksi langsung antara pendamping dan kelompok tani hutan, serta penggunaan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi.

Malahayati menjelaskan bahwa sejak awal pendampingan, tim WRI mempelajari terlebih dahulu kondisi sosial budaya masyarakat setempat, termasuk norma adat, sistem kemasyarakatan, serta peran tokoh adat dan agama. Hal ini dilakukan agar komunikasi yang dibangun tidak menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman.

“Kami menyadari bahwa masyarakat di HKm Bukit Sultan punya kearifan lokal yang kuat. Jadi kami tidak bisa masuk dengan pendekatan yang kaku atau terlalu teknis. Kami menyesuaikan gaya komunikasi kami agar lebih bisa diterima.”⁶⁰



⁶⁰ Ibid.,h. 56

1. Pendekatan Interpersonal dan Komunikasi Kelompok

Gambar. 4.7 WRI Melakukan Diskusi Kelompok Terkait Luas dan Batas Wilayah (Dokumentasi WRI 2024)



Sumber; *World Resources Institute (WRI)Indonesia, 2024.*

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh WRI Indonesia adalah pendekatan komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah interaksi langsung yang memungkinkan pendamping untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan anggota kelompok tani hutan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan kepercayaan dan memperkuat keterlibatan kelompok dalam setiap tahap program perhutanan sosial.

Metode komunikasi kelompok yang digunakan oleh WRI Indonesia melibatkan diskusi kelompok dan forum bersama yang memungkinkan setiap anggota untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terkait pengelolaan hutan. Dalam proses ini, anggota kelompok tidak hanya mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pendamping, tetapi juga aktif memberikan masukan dan merumuskan solusi bersama untuk masalah yang mereka hadapi dalam pengelolaan hutan. Hal ini mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih erat antara anggota kelompok dan memperkuat rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Pentingnya komunikasi kelompok juga terlihat dalam kegiatan pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia. Pelatihan ini mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti cara menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif, serta cara memfasilitasi diskusi kelompok yang produktif. Pendekatan ini membantu meningkatkan kapasitas kelompok dalam menyampaikan pesan-pesan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan kepada anggota kelompok lainnya dan masyarakat luas.

2. Pelatihan dan Workshop Partisipatif

Gambar. 4.8 WRI Indonesia memberikan kunjungan belajar Bersama seluruh perwakilan kelompok dampingan (Dokumentasi WRI 2024)



Sumber; *World Resources Institute (WRI)Indonesia*, 2024.

Pelatihan dan workshop merupakan metode komunikasi yang sangat penting dalam strategi WRI Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis kelompok tani hutan, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif di tingkat lokal. Workshop partisipatif ini melibatkan anggota kelompok dalam proses belajar yang interaktif, di mana mereka dapat langsung mempraktikkan konsep yang diajarkan.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan, seperti teknik agroforestry, pengelolaan kebakaran hutan, serta cara-cara

menjaga keberagaman hayati dalam sistem perhutanan sosial. Di samping itu, pelatihan ini juga mencakup teknik-teknik komunikasi, seperti bagaimana menggunakan media untuk menyebarkan pesan dan mengadvokasi kebijakan perhutanan sosial di tingkat pemerintahan daerah.

Pentingnya pendekatan partisipatif dalam pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang didapatkan tidak hanya ditransfer secara satu arah, tetapi juga diadaptasi sesuai dengan konteks lokal yang dihadapi oleh kelompok tani hutan. Dengan cara ini, kelompok tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengolah informasi tersebut dan menerapkannya dalam praktek.

3. Penyuluhan Berbasis Komunitas

Salah satu metode komunikasi yang sangat efektif dalam program perhutanan sosial ini adalah penyuluhan berbasis komunitas. WRI Indonesia bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat dan fasilitator setempat, untuk menyampaikan informasi kepada anggota kelompok tani hutan. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung di lapangan, yang memungkinkan kelompok untuk bertanya langsung dan memperoleh jawaban atas masalah yang mereka hadapi.

Metode penyuluhan ini juga mencakup kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat jika mereka mengelola hutan secara bertanggung jawab. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, menggunakan bahasa lokal dan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Penyuluhan berbasis komunitas juga memiliki keuntungan dalam menciptakan kesadaran kolektif di antara anggota kelompok. Hal ini mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan hutan dan

mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik-praktik yang tidak berkelanjutan.

4. Pemanfaatan Media Sosial dan Platform Digital

Selain komunikasi tatap muka dan penyuluhan berbasis komunitas, WRI Indonesia juga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi kepada kelompok tani hutan dan masyarakat secara umum. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, digunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi terkait perhutanan sosial, kebijakan pemerintah, serta kegiatan-kegiatan yang relevan dengan pengelolaan hutan.

Melalui media sosial, WRI Indonesia dapat menjangkau kelompok tani hutan yang berada di lokasi yang lebih terpencil dan mempercepat penyebaran informasi penting. Selain itu, media sosial juga memungkinkan untuk memperluas dialog antara kelompok tani hutan dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, media sosial menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk menciptakan komunikasi dua arah yang dinamis antara semua pemangku kepentingan dalam program perhutanan sosial.

Dalam hal ini, WRI Indonesia juga mengedukasi kelompok tani hutan mengenai penggunaan media sosial yang efektif. Pelatihan tentang cara memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat jaringan komunikasi antar kelompok.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh WRI Indonesia dalam pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan melibatkan pendekatan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan kapasitas komunikasi lokal. Dengan menggabungkan pendekatan komunikasi

interpersonal, penyuluhan berbasis komunitas, pelatihan partisipatif, dan pemanfaatan media sosial, WRI Indonesia berhasil membangun jaringan komunikasi yang kuat dan mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial. Metode ini tidak hanya memperkuat pemahaman kelompok tani hutan tentang pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Selain komunikasi tatap muka, Ahmad Nasution menyebut bahwa media visual seperti peta spasial, poster, dan infografis sederhana juga sangat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep teknis seperti batas wilayah hutan, zonasi, dan rencana pengelolaan.

“Kami menggunakan peta dan citra satelit untuk menjelaskan posisi lahan dan fungsi hutannya. Masyarakat lebih mudah paham kalau ada gambaran visual, tidak hanya mendengar penjelasan lisan.”⁶¹

Untuk komunikasi sehari-hari, WRI juga memanfaatkan grup WhatsApp yang melibatkan perwakilan kelompok tani hutan, perangkat gampong, dan tim fasilitator. Grup ini digunakan untuk berbagi informasi cepat, koordinasi kegiatan lapangan, hingga berbagi dokumen digital secara praktis. Ahmad menambahkan bahwa:

“Tidak semua masyarakat aktif di WhatsApp atau familiar dengan dokumen digital, jadi tetap harus seimbang. Informasi penting tetap kami sampaikan secara langsung di lapangan.”⁶²

Dengan demikian, bentuk media komunikasi yang paling efektif menurut WRI adalah komunikasi interpersonal langsung yang didukung oleh media visual dan komunikasi digital terbatas, tergantung pada situasi dan karakteristik masyarakat yang dilayani.

⁶¹ Ibid.,h. 57

⁶² Ibid.,h. 57

D. Tahapan Pendampingan

Proses pendampingan yang dilakukan oleh *World Resources Institute (WRI)* Indonesia dalam mendukung kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong Aceh Besar, terdiri dari beberapa tahapan penting yang dirancang untuk memastikan keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tahapan-tahapan ini dimulai dari sosialisasi konsep perhutanan sosial, dilanjutkan dengan pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani, hingga tahap monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setiap tahapan memiliki tujuan yang spesifik dan pendekatan yang berbeda, namun saling terkait untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

1. Tahap Sosialisasi: Membangun Kesadaran Masyarakat

Tahap pertama dalam proses pendampingan adalah sosialisasi, yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan membangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sosialisasi ini menjadi dasar untuk menciptakan pemahaman yang kuat tentang peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diperoleh melalui pengelolaan hutan secara bersama-sama.

Dalam tahap sosialisasi, WRI Indonesia bekerja sama dengan pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang perhutanan sosial. Kegiatan ini biasanya melibatkan pertemuan terbuka, diskusi kelompok, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan mencakup manfaat pengelolaan hutan dalam jangka panjang, pentingnya keberagaman hayati, serta bagaimana perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif seperti agroforestry, pemanfaatan kayu secara berkelanjutan, dan pengembangan pariwisata berbasis ekologi.

Selama tahap sosialisasi, WRI juga fokus pada penghapusan mitos atau persepsi yang salah terkait dengan perhutanan sosial, seperti ketakutan akan pengurangan hak akses terhadap lahan atau ketidakpastian hukum yang terkait dengan pengelolaan hutan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan berbasis bukti, WRI berusaha mengubah pandangan negatif masyarakat dan menggantikannya dengan pemahaman yang lebih positif dan proaktif.

Gambar. 4.9 WRI Indonesia memberikan sosialisasi pasca terbit izin



Sumber; *World Resources Institute (WRI) Indonesia*, 2024.

Setelah tahap sosialisasi berhasil membangun kesadaran dan pemahaman awal, tahapan selanjutnya adalah pelatihan dan pemberdayaan. Di tahap ini, WRI Indonesia memberikan pelatihan teknis dan manajerial kepada kelompok tani hutan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis terkait dengan pengelolaan hutan, tetapi juga pentingnya keterampilan manajerial untuk menjalankan usaha perhutanan sosial. Fasilitator lapangan mengatakan.

“Pelatihan ini mencakup penyusunan rencana bisnis, pemasaran hasil hutan, hingga teknik pengolahan komoditas lokal, seperti kopi robusta. Di wilayah Lhoong, misalnya, masyarakat diberikan pelatihan mulai dari tahap

panen kopi, pengolahan pascapanen, hingga teknik pemasaran produk berbasis komunitas."⁶³

Pelatihan teknis yang diberikan oleh WRI mencakup berbagai topik, seperti teknik agroforestry, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kebakaran hutan, serta teknik pemanfaatan hasil hutan yang ramah lingkungan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa kelompok tani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola hutan dengan cara yang efisien, ramah lingkungan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain pelatihan teknis, WRI juga memberikan pelatihan manajerial kepada kelompok tani hutan. Pelatihan ini mencakup topik seperti perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan cara-cara untuk membangun dan mengelola organisasi secara efisien. Dengan memperkuat kapasitas manajerial, WRI berharap kelompok tani dapat mengelola kegiatan perhutanan sosial mereka secara lebih profesional dan mandiri. Hal ini penting agar mereka tidak hanya dapat mengelola hutan secara berkelanjutan, tetapi juga dapat menjalankan usaha perhutanan sosial sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Tahap pemberdayaan ini juga melibatkan pembentukan kelompok-kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam program perhutanan sosial. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta solusi atas masalah yang dihadapi kelompok tani dalam pengelolaan hutan. WRI Indonesia berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan dan membimbing kelompok dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan keputusan yang berbasis konsensus.

⁶³ Wawancara dengan Fasilitator Lapangan WRI Indonesia di Aceh Besar, 15 Februari 2025.

Gambar. 4.10 Tahap Monitoring dan Evaluasi: Memastikan Keberlanjutan Program



Sumber; *World Resources Institute (WRI) Indonesia*, 2024.

Tahap terakhir dalam proses pendampingan adalah monitoring dan evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok tani hutan terus berkembang dan bahwa program perhutanan sosial yang dijalankan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk menilai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, serta mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program.

WRI Indonesia melakukan monitoring terhadap berbagai aspek kegiatan perhutanan sosial, seperti pemanfaatan sumber daya alam, perkembangan ekonomi kelompok tani, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam program. Data yang dikumpulkan selama tahap monitoring ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program, serta untuk menyusun rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang dari perhutanan sosial dapat tercapai, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menilai kemampuan kelompok tani dalam mengelola kegiatan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada pendampingan eksternal. Salah satu indikator keberhasilan yang penting adalah sejauh mana kelompok tani dapat mengelola sumber daya alam dengan baik dan

menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. WRI Indonesia menggunakan hasil evaluasi ini untuk merancang strategi pendampingan lanjutan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok tani hutan.

Secara keseluruhan, tahapan monitoring dan evaluasi ini memastikan bahwa program perhutanan sosial tidak hanya berlangsung dengan baik, tetapi juga dapat beradaptasi dengan dinamika yang ada di lapangan, sehingga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Tahapan pendampingan yang dilakukan oleh WRI Indonesia dalam mendukung kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan. Dimulai dengan sosialisasi untuk membangun kesadaran, dilanjutkan dengan pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani, hingga tahap monitoring dan evaluasi yang memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, ketiga tahapan ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, WRI Indonesia mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik dan lebih inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara, WRI Indonesia secara aktif melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi komunikasinya selama proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan. Evaluasi ini dilakukan tidak hanya secara formal melalui laporan berkala, tetapi juga melalui pendekatan reflektif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurut Malahayati, evaluasi dilakukan dalam dua bentuk utama: internal dan lapangan. Di tingkat internal, tim WRI secara rutin melakukan rapat evaluasi bulanan yang membahas perkembangan komunikasi, tantangan lapangan, dan respons masyarakat terhadap materi atau pendekatan yang digunakan.

“Kami punya sistem monitoring internal. Setiap bulan kami evaluasi strategi komunikasi, apakah masyarakat memahami informasi yang disampaikan, atau apakah masih ada kesalahpahaman.”⁶⁴”

Sementara itu, Ahmad Nasution menekankan bahwa evaluasi yang paling efektif justru datang dari refleksi bersama masyarakat, seperti melalui forum diskusi, musyawarah rutin, atau saat kunjungan lapangan. Umpan balik ini menjadi indikator langsung untuk menilai apakah pesan komunikasi telah diterima dengan baik atau perlu disesuaikan kembali.

“Evaluasi kami lakukan juga lewat tanya jawab langsung dengan kelompok tani. Misalnya, kalau mereka bisa menjelaskan kembali apa itu perhutanan sosial dan apa manfaatnya, berarti komunikasi kami berhasil”⁶⁵.”

Selain itu, WRI juga menggunakan indikator perubahan perilaku sebagai bagian dari evaluasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai aktif mengelola lahan sesuai rencana kerja, atau muncul inisiatif lokal untuk konservasi hutan, hal itu dianggap sebagai bukti efektivitas komunikasi yang telah dibangun.

Evaluasi ini bersifat dinamis dan menjadi dasar dalam menyesuaikan strategi komunikasi ke depannya, baik dari segi isi pesan, media yang digunakan, maupun pendekatan sosial-budaya yang diterapkan.

E. Hambatan dalam Pendampingan

Proses pendampingan yang dilakukan oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam mendukung kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong Aceh Besar, meskipun berhasil dalam banyak hal, tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi keberhasilan implementasi program dan menjadi kendala dalam mencapai tujuan

⁶⁴ Ibid.,h. 56

⁶⁵ Ibid.,h.57

yang diinginkan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses pendampingan ini antara lain adalah keterbatasan literasi masyarakat mengenai isu lingkungan, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan akses teknologi informasi di wilayah tersebut.

1. Keterbatasan Literasi Masyarakat mengenai Isu Lingkungan

Salah satu hambatan terbesar dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan adalah keterbatasan literasi masyarakat mengenai isu-isu lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat setempat belum sepenuhnya memahami pentingnya keberagaman hayati, konsep pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, serta hubungan antara perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam. Keterbatasan pengetahuan ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.

Namun, WRI tetap mempertimbangkan keterbatasan akses teknologi dan literasi digital sebagian masyarakat. Oleh karena itu, kombinasi antara komunikasi konvensional (*luring*) dan digital (*daring*) diterapkan secara fleksibel. Ahmad mengatakan bahwa:

“Tidak semua masyarakat aktif di WhatsApp atau familiar dengan dokumen digital, jadi tetap harus seimbang. Informasi penting tetap kami sampaikan secara langsung di lapangan.”⁶⁶

Dengan demikian, bentuk media komunikasi yang paling efektif menurut WRI adalah komunikasi interpersonal langsung yang didukung oleh media visual dan komunikasi digital terbatas, tergantung pada situasi dan karakteristik masyarakat yang dilayani.

Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh WRI Indonesia, terdapat kesulitan dalam menjelaskan konsep-konsep teknis dan ilmiah mengenai

⁶⁶ Ibid.,h. 57

perhutanan sosial, terutama ketika informasi tersebut harus disampaikan kepada masyarakat yang belum memiliki pemahaman dasar mengenai isu lingkungan. Masyarakat lebih terbiasa dengan pendekatan konvensional dalam mengelola hutan, seperti pembukaan lahan untuk pertanian atau pemanfaatan kayu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem.

Untuk mengatasi masalah ini, WRI Indonesia perlu menyederhanakan pesan yang disampaikan dan menggunakan metode yang lebih adaptif terhadap konteks lokal. Misalnya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta memberikan contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun demikian, proses ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Hambatan lain yang signifikan dalam pendampingan adalah adanya resistensi terhadap perubahan. Masyarakat yang telah terbiasa dengan pola pengelolaan hutan yang lama sering kali merasa enggan untuk mengubah kebiasaan atau cara kerja mereka, meskipun ada manfaat yang jelas dari pendekatan baru yang lebih berkelanjutan. Resistensi ini seringkali berasal dari ketakutan terhadap ketidakpastian, kekhawatiran akan dampak ekonomi, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pihak luar yang memperkenalkan perubahan.

Di HKm Bukit Sultan, beberapa kelompok tani hutan yang terlibat dalam program perhutanan sosial awalnya menunjukkan keengganan untuk beralih dari metode konvensional mereka ke metode yang lebih ramah lingkungan. Beberapa di antaranya menganggap bahwa pendekatan baru ini akan mengurangi hasil ekonomi mereka dalam jangka pendek, meskipun pada kenyataannya pendekatan tersebut dirancang untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, perubahan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi atau cara hidup yang telah berlangsung lama. Sebagai contoh, praktik-praktik pengelolaan hutan yang sudah ada, meskipun tidak selalu berkelanjutan, dianggap sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan sosial dan budaya yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

Untuk mengatasi resistensi ini, WRI Indonesia perlu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam program perhutanan sosial dapat membantu menumbuhkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap perubahan. Selain itu, penting untuk menekankan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Menurut Malahayati, salah satu bentuk resistensi awal yang dihadapi adalah keraguan masyarakat terhadap tujuan program dan peran lembaga luar seperti WRI.

“Awalnya masyarakat ragu, mereka takut ini hanya proyek sesaat atau ada kepentingan tersembunyi. Jadi butuh waktu untuk membangun kepercayaan itu.”⁶⁷

Sementara itu, Ahmad Nasution menambahkan bahwa beberapa anggota masyarakat menunjukkan sikap pasif atau kurang responsif karena belum memahami sepenuhnya manfaat dari program perhutanan sosial. Dalam beberapa kasus, perbedaan tingkat pendidikan dan literasi lingkungan juga menjadi kendala tersendiri dalam proses penyampaian pesan.

“Ada juga yang merasa bahwa hutan itu bukan urusan mereka, atau mereka takut nanti justru dilarang mengelola. Jadi kami harus pelan-pelan

⁶⁷ Ibid.,h. 56

menjelaskan bahwa program ini bukan untuk melarang, tapi justru memberi legalitas."⁶⁸

Resistensi juga muncul dari kurangnya pemahaman tentang tata kelola hutan yang berkelanjutan, serta kekhawatiran terhadap perubahan pola kerja atau sistem yang sudah lama berlaku di masyarakat. Menghadapi tantangan ini, WRI mengandalkan strategi komunikasi berbasis dialog, edukasi berulang, dan pelibatan tokoh lokal untuk meredam resistensi dan membangun penerimaan secara bertahap.

3. Keterbatasan Akses Teknologi Informasi

Salah satu tantangan lainnya dalam pendampingan adalah keterbatasan akses teknologi informasi di wilayah HKm Bukit Sultan, yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dan penyebaran informasi. Meskipun di era digital saat ini teknologi informasi memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan informasi dan mempercepat proses komunikasi, banyak anggota kelompok tani hutan di HKm Bukit Sultan yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, seperti internet dan perangkat digital.

Keterbatasan ini membuat penyampaian informasi melalui media sosial atau platform digital menjadi tidak maksimal. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini masih mengandalkan komunikasi tatap muka dan media tradisional, seperti pertemuan langsung atau penyuluhan berbasis komunitas. Meskipun pendekatan ini efektif dalam konteks lokal, namun dalam jangka panjang, keterbatasan akses teknologi dapat menghambat perkembangan program, terutama dalam hal memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas kelompok tani dalam mengakses informasi terbaru mengenai kebijakan, teknologi, dan pasar.

Selain itu, keterbatasan ini juga mempengaruhi kemampuan kelompok tani untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan hutan, seperti

⁶⁸ Ibid.,h. 57

penggunaan aplikasi berbasis GPS untuk pemetaan lahan atau penggunaan platform online untuk menjual produk-produk hasil hutan mereka. Tanpa akses yang memadai, kelompok tani hutan kesulitan untuk memanfaatkan potensi penuh yang ditawarkan oleh teknologi informasi.

Untuk mengatasi masalah ini, WRI Indonesia berupaya untuk meningkatkan akses teknologi dengan menyediakan pelatihan terkait penggunaan perangkat digital sederhana dan memfasilitasi kelompok tani dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya teknologi. Selain itu, WRI juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil, guna memastikan bahwa kelompok tani dapat terus mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan hutan.

Dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, beberapa hambatan telah diidentifikasi yang mempengaruhi keberhasilan program. Keterbatasan literasi masyarakat mengenai isu lingkungan, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan akses teknologi informasi menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Untuk mengatasi hambatan ini, WRI Indonesia perlu terus mengadaptasi pendekatan komunikasi dan pemberdayaannya, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap dan memastikan akses yang lebih baik terhadap teknologi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan program perhutanan sosial dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Upaya Mengatasi Hambatan

Dalam menjalankan program perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong Aceh Besar, *World Resources Institute (WRI)* Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas program. Keterbatasan literasi masyarakat mengenai isu lingkungan, resistensi terhadap

perubahan, serta keterbatasan akses teknologi informasi menjadi tantangan yang signifikan dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial. Namun, WRI Indonesia mengadopsi berbagai pendekatan adaptif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa program dapat berjalan dengan sukses serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh WRI Indonesia antara lain adalah penggunaan media lokal, penggunaan bahasa daerah, serta memperkuat jaringan dengan tokoh masyarakat.

Menghadapi tantangan ini, WRI mengandalkan strategi komunikasi berbasis dialog, edukasi berulang, dan pelibatan tokoh lokal untuk meredam resistensi dan membangun penerimaan secara bertahap. Ahmad mengatakan, bahwa:

“Kami tidak langsung memaksakan konsep. Kami mulai dari mendengarkan dulu, lalu pelan-pelan memberikan pemahaman lewat contoh konkret dan keberhasilan dari desa lain.”⁶⁹

Dengan pendekatan tersebut, resistensi yang awalnya muncul perlahan berubah menjadi keterlibatan aktif, seiring meningkatnya pemahaman dan rasa memiliki terhadap program.

5. Penggunaan Media Lokal dan Bahasa Daerah

Salah satu upaya yang dilakukan oleh WRI Indonesia untuk mengatasi hambatan keterbatasan literasi masyarakat dan resistensi terhadap perubahan adalah dengan memanfaatkan media lokal dan bahasa daerah dalam proses komunikasi. Media lokal, seperti radio komunitas, selebaran, dan poster, digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan media lokal ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat

⁶⁹ Ibid.,h. 57

yang lebih luas, terutama mereka yang tidak memiliki akses langsung ke media massa atau internet.

Selain itu, WRI Indonesia juga mengadopsi penggunaan bahasa daerah dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sering kali disesuaikan dengan konteks lokal agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Penggunaan bahasa daerah memudahkan penyampaian pesan-pesan terkait perhutanan sosial, pentingnya keberagaman hayati, serta manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan bahasa yang familiar, WRI Indonesia dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dan membangun kepercayaan dengan masyarakat.

Pendekatan ini juga membantu mengurangi kesenjangan pemahaman antara pihak eksternal (seperti WRI Indonesia) dan masyarakat lokal. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa masyarakat di HKM Bukit Sultan memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, dan tidak semua anggota komunitas memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu lingkungan atau perhutanan sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah dan media lokal memungkinkan komunikasi yang lebih inklusif dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya atau bahasa.

6. Memperkuat Jaringan dengan Tokoh Masyarakat

Gambar. 4.11 WRI Indonesia Melakukan diskusi dengan Bupati Aceh Besar



Sumber; *World Resources Institute (WRI) Indonesia, 2025.*

Selain menggunakan media lokal dan bahasa daerah, WRI Indonesia juga mengadopsi strategi untuk memperkuat jaringan dengan tokoh masyarakat lokal dalam upaya mengatasi hambatan yang ada. Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendampingan perhutanan sosial, karena mereka dianggap sebagai pemimpin dan figur yang dihormati oleh masyarakat setempat. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan program, WRI Indonesia dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mempercepat proses adopsi perubahan oleh masyarakat.

Melalui pendekatan ini, WRI Indonesia berharap dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan yang mungkin timbul, karena tokoh masyarakat yang terlibat dalam program dapat menjadi agen perubahan yang memperkenalkan dan menjelaskan manfaat perhutanan sosial dengan cara yang lebih diterima oleh masyarakat. Tokoh masyarakat juga dapat berfungsi sebagai fasilitator yang membantu menyampaikan pesan program kepada anggota komunitas lainnya, terutama mereka yang lebih enggan untuk terlibat dalam program atau yang skeptis terhadap manfaatnya.

Selain itu, memperkuat jaringan dengan tokoh masyarakat juga memungkinkan WRI Indonesia untuk lebih memahami dinamika sosial yang ada di tingkat lokal. Setiap komunitas memiliki struktur sosial yang berbeda, dan tokoh masyarakat sering kali memiliki wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, WRI dapat lebih mudah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin belum terdeteksi dan merancang strategi pendampingan yang lebih efektif.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar warga dalam mengelola hutan secara bersama-sama di desa ini terjalin dengan baik dan didasarkan pada prinsip gotong royong serta saling percaya. Bapak Habibi, sebagai Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), menjelaskan bahwa kerjasama antarwarga dalam kelompok sangat penting, terutama dalam

hal pembagian tugas, pemeliharaan hutan, dan pengambilan keputusan bersama. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara anggota kelompok sangat mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Bapak Habibi mengaakan bahwa:

*“sebagai salah satu anggota kelompok, menambahkan bahwa hubungan antarwarga terasa semakin erat sejak program perhutanan sosial dimulai. Menurutnya, program ini tidak hanya melibatkan warga dalam kegiatan fisik seperti penanaman pohon, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan semua anggota kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pertemuan dan diskusi menjadikan mereka merasa lebih terikat satu sama lain. Bapak Habibi menilai bahwa kegiatan bersama ini turut memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga”.*⁷⁰

Sementara itu, Bapak Amu menyatakan bahwa dalam mengelola hutan bersama-sama, terdapat rasa saling mendukung dan membantu antara sesama anggota. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya mungkin ada perbedaan pendapat terkait metode atau pembagian hasil, namun melalui musyawarah, semua perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam praktiknya, anggota kelompok saling membantu, baik dalam hal tenaga maupun informasi terkait dengan pengelolaan hutan. Hal ini membuat suasana kerja sama terasa lebih harmonis dan memperkuat ikatan sosial antarwarga.

7. Pelatihan dan Pendekatan Partisipatif

Gambar. 4.12 WRI memberikan Pelatihan Pembuatan Aren Dari Bahan Nira



Sumber; Sumber; *World Resources Institute (WRI) Indonesia, 2024.*

⁷⁰ Ibid.,h. 66

Sebagai bagian dari upaya mengatasi hambatan dalam proses pendampingan, WRI Indonesia juga memfokuskan upaya pada pelatihan dan pendekatan partisipatif. Dalam banyak kasus, hambatan terhadap perubahan terjadi karena masyarakat merasa tidak memiliki kendali atas keputusan yang dibuat terkait dengan pengelolaan hutan mereka. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran aktif dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi program.

WRI Indonesia mengadakan berbagai pelatihan yang melibatkan anggota komunitas, di mana mereka tidak hanya diajarkan tentang teknik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, tetapi juga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan cara ini, masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dan kontrol dalam program, yang pada gilirannya dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Pendekatan partisipatif ini juga membantu mengatasi tantangan terkait dengan literasi lingkungan, karena masyarakat langsung terlibat dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pelatihan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan hutan.

Dari wawancara yang dilakukan, para informan menyampaikan beberapa harapan terhadap kelanjutan program perhutanan sosial di masa mendatang. Bapak Habibi mengungkapkan bahwa masyarakat berharap agar program ini dapat terus berlanjut dan semakin diperluas cakupannya, khususnya dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan teknis yang lebih mendalam. Ia berharap bahwa dengan adanya pelatihan lebih lanjut, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada pihak luar. Selain itu, ia juga menginginkan agar program ini dapat memberikan peluang pasar yang lebih luas bagi hasil hutan yang mereka kelola, seperti produk hutan bukan kayu

(HHBK) yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Habibi, menambahkan bahwa:

“Berharap agar program ini dapat terus memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan. Ia menyampaikan harapannya agar lebih banyak perempuan yang diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pelatihan dan kegiatan pengelolaan hutan, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dalam memajukan ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, Bapak Habibi juga berharap agar pemerintah dan pihak WRI dapat memberikan dukungan yang lebih dalam hal pemasaran produk hasil hutan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”⁷¹

Sementara itu, Bapak Amu berharap agar program perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan aspek ekonomi bagi masyarakat. Ia menginginkan adanya peningkatan infrastruktur dan akses terhadap pasar yang lebih baik untuk produk hasil hutan, serta pendampingan dalam mengelola dan memasarkan produk tersebut. Selain itu, ia berharap agar pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan agar masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses hak atas lahan yang mereka kelola.

8. Meningkatkan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam proses pendampingan adalah keterbatasan akses teknologi informasi di wilayah HKm Bukit Sultan. Untuk mengatasi hambatan ini, WRI Indonesia berupaya meningkatkan akses teknologi di tingkat lokal. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyediakan pelatihan mengenai penggunaan teknologi sederhana, seperti perangkat seluler atau aplikasi berbasis GPS untuk memetakan lahan dan mengelola data. Selain itu, WRI juga berusaha untuk memperbaiki infrastruktur teknologi di daerah tersebut, bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke

⁷¹ Ibid.,h. 66

teknologi yang dapat mendukung pengelolaan hutan. Bapak Amu, mengatakan dari hasil wawancara:

“Berharap agar program perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan aspek ekonomi bagi masyarakat. Ia menginginkan adanya peningkatan infrastruktur, teknologi dan akses terhadap pasar yang lebih baik untuk produk hasil hutan, serta pendampingan dalam mengelola dan memasarkan produk tersebut. Selain itu, ia berharap agar pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan agar masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses hak atas lahan yang mereka kelola.”⁷²

Selain itu, WRI Indonesia juga mengadopsi metode komunikasi berbasis teknologi yang lebih sederhana, seperti penggunaan SMS untuk menyebarkan informasi penting atau memperkenalkan aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan cara ini, meskipun akses internet terbatas, WRI masih dapat menjangkau masyarakat dengan informasi yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan hutan.

Upaya mengatasi hambatan dalam proses pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKM Bukit Sultan memerlukan pendekatan yang adaptif dan fleksibel. Penggunaan media lokal dan bahasa daerah, memperkuat jaringan dengan tokoh masyarakat, serta meningkatkan pelatihan dan akses teknologi menjadi langkah-langkah strategis yang diadopsi oleh WRI Indonesia untuk memastikan bahwa program perhutanan sosial dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis partisipasi, WRI Indonesia berharap dapat mengatasi tantangan yang ada dan mendorong keberlanjutan program perhutanan sosial di masa depan.

⁷² Ibid.,h. 66

F. Analisis Data Berdasarkan Kerangka Teori Komunikasi Pembangunan

Pada bagian ini, analisis data akan dibahas dengan menggunakan kerangka teori Komunikasi Pembangunan. Teori ini berfokus pada bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial yang positif, dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terlibat. Dalam penelitian ini, komunikasi pembangunan digunakan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh *World Resources Institute (WRI)* Indonesia dalam mendukung perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, Lamtanjong Aceh Besar, dapat mempengaruhi perubahan dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Teori Komunikasi Pembangunan

Teori Komunikasi Pembangunan berfokus pada penggunaan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Komunikasi dalam konteks ini bukan hanya dilihat sebagai transfer informasi, tetapi sebagai proses interaktif yang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengimplementasikan solusi untuk masalah sosial dan pembangunan. Teori ini menekankan pada partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta pendekatan dua arah dalam komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pada prinsipnya, komunikasi pembangunan berusaha untuk merangsang perubahan sosial yang berkelanjutan melalui proses yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, peran WRI Indonesia dalam mendampingi kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan sejalan dengan prinsip-prinsip komunikasi pembangunan, di mana masyarakat bukan hanya sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam pengelolaan hutan mereka.

2. Penerapan Komunikasi Pembangunan dalam Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, penerapan teori komunikasi pembangunan terlihat jelas pada tiga aspek utama, yaitu: partisipasi masyarakat, pemberdayaan melalui pelatihan dan pendidikan, serta penggunaan pendekatan komunikasi yang adaptif. Setiap aspek ini akan dianalisis untuk menggambarkan bagaimana WRI Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip komunikasi pembangunan dalam mendukung program perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan.

a. Partisipasi Masyarakat

Salah satu prinsip utama dari teori komunikasi pembangunan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam program perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan, WRI Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat tidak hanya dalam penerimaan informasi, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan, seperti pertemuan komunitas, lokakarya, dan pelatihan yang diadakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsep perhutanan sosial serta pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan hutan.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang relevan, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan lokal yang mungkin tidak diketahui oleh pihak luar. WRI Indonesia memfasilitasi komunikasi dua arah yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Keterlibatan ini juga berdampak positif pada keberlanjutan program. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam keputusan yang diambil, mereka

lebih cenderung untuk mempertahankan dan melanjutkan program tersebut, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilannya.

b. Pemberdayaan melalui Pelatihan dan Pendidikan

Pemberdayaan merupakan elemen kunci dalam komunikasi pembangunan, dan dalam konteks perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan menjadi hal yang sangat penting. WRI Indonesia menggunakan pendekatan pemberdayaan dengan menyediakan berbagai pelatihan teknis dan manajerial bagi kelompok tani hutan di HKM Bukit Sultan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan hingga keterampilan manajerial dalam mengelola kelompok tani secara efektif.

Pemberdayaan melalui pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan praktis yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya alam mereka secara mandiri. Dengan pelatihan ini, masyarakat menjadi lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan yang ada, baik dalam hal pengelolaan hutan maupun dalam menghadapi masalah ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan atau cuaca ekstrem.

Proses pemberdayaan ini sejalan dengan prinsip komunikasi pembangunan yang menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Melalui pelatihan dan pendidikan, WRI Indonesia tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola pikir dan kebiasaan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan dan lingkungan.

c. Pendekatan Komunikasi yang Adaptif

Pendekatan komunikasi yang adaptif adalah prinsip lain yang tercermin dalam penerapan komunikasi pembangunan oleh WRI Indonesia. Dalam menghadapi beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di HKm Bukit Sultan, seperti keterbatasan literasi mengenai isu lingkungan dan resistensi terhadap perubahan, WRI Indonesia mengadaptasi strategi komunikasi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan media lokal dan bahasa daerah dalam menyampaikan informasi.

Media lokal, seperti radio komunitas, poster, dan selebaran, digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penggunaan bahasa daerah memudahkan komunikasi dengan masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami bahasa Indonesia atau istilah-istilah teknis terkait dengan isu lingkungan. Selain itu, WRI Indonesia juga berusaha untuk memperkuat jaringan dengan tokoh masyarakat lokal yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas. Dengan cara ini, WRI Indonesia memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Pendekatan komunikasi yang adaptif ini memungkinkan WRI Indonesia untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga mencerminkan prinsip komunikasi pembangunan yang mengutamakan komunikasi yang relevan dan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang dilayani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi komunikasi *World Resources Institute (WRI) Indonesia* dalam pendampingan kelompok perhutanan sosial di HKm Bukit Sultan Lamtanjong, Aceh Besar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi Komunikasi yang Efektif WRI Indonesia telah mengimplementasikan strategi komunikasi pembangunan yang efektif dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan komunikasi satu arah, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis, masyarakat di HKm Bukit Sultan Lamtanjong berhasil memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perhutanan sosial dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
2. Keberhasilan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan yang dilakukan oleh WRI berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan kelompok perhutanan sosial. Masyarakat yang terlibat dalam program ini kini memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola hutan, menyusun Rencana Kerja Usaha Perhutanan Sosial (RKUPS), dan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan. Program ini juga telah meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat dalam mengelola kawasan hutan mereka.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari program perhutanan sosial yang dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia di HKm Bukit Sultan Lamtanjong, Aceh Besar:

1. Penguatan Kolaborasi dengan Pemerintah dan Stakeholder Lokal Agar program perhutanan sosial dapat berkelanjutan, disarankan agar WRI terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya yang ada mendukung keberlanjutan program dan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses bantuan yang mereka butuhkan. Koordinasi yang lebih intensif antara WRI dan pemerintah daerah dapat membantu memitigasi tantangan terkait kebijakan dan peraturan yang mungkin menghambat pelaksanaan perhutanan sosial di masa depan.
2. Peningkatan Sumber Daya untuk Mendukung Keberlanjutan Program Untuk mendukung keberlanjutan program, sangat penting bagi WRI untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya, baik dalam bentuk dana, fasilitas, maupun tenaga ahli. Pendampingan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan, sangat bergantung pada adanya sumber daya yang memadai. Selain itu, penting untuk menciptakan akses pasar yang lebih luas untuk hasil hutan yang dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F. (2015). *Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dinas Kehutanan Aceh, *Profil Kawasan Hutan Aceh Besar*, Banda Aceh: Dishut Aceh, 2021, hlm. 23.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: RemajaRosdakarya,2003.
- Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press, 2003.
- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Wibowo, P. S. *Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Effendy, U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Perhutanan Sosial di Indonesia: Strategi dan Implementasi*, Jakarta: KLHK, 2022, hlm. 45.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Jakarta: KLHK.
- Fadli, A., & Sazali, H. (2024). Peran Media Sosial Instagram @Greenpeaceid Sebagai Media Kampanye Dalam Menjaga Lingkungan. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 8(2), 209–222.

Fadli, A., & Sazali, H. (2024). Peran Media Sosial Instagram @Greenpeaceid Sebagai Media Kampanye Dalam Menjaga Lingkungan. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 8(2), 209–222.

Global Forest Watch. (2020). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*. Diakses dari <https://www.globalforestwatch.org> diakses maret 2025.

Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi lingkungan dalam mengembangkan kelestarian hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13.

Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi lingkungan dalam mengembangkan kelestarian hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13.

https://sips.acehprov.go.id/publik/berita_detail/2024/11/si-jantung-hati-sultan
diakses Maret 2025

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). Data Akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional.

Rogers, Everett M. (2003). *Diffusion of Innovations*. Fifth Edition. New York: Free Press.

World Resources Institute Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Program Perhutanan Sosial di Aceh.

Kemitraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Ilmu Sosial dan Lingkungan*, Vol. 10, No. 2, 2024.

Kirkpatrick, D. L. (1998). *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

- Kurniawan, A. (2020). *Pelestarian Hutan dan Ketahanan Pangan: Dampak Langsung terhadap Kualitas Air dan Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan*, 12(3), 45–58.
- Kurniawan, A. (2020). *Pelestarian Hutan dan Ketahanan Pangan: Dampak Langsung terhadap Kualitas Air dan Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan*, 12(3), 45–58.
- Laporan Kondisi Ekologis Hutan Kemasyarakatan HKm Bukit Sultan," World Resources Institute, 2022.Publications
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M., "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook," (California: SAGE Publications, 1994), 10.
- Monitoring dan Evaluasi Program Konservasi Hutan," Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022.
- Nugroho, A. (2015). *Peran Lembaga Pendamping dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 9.
- Panduan Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
- Patton, M.Q., "Qualitative Research & Evaluation Methods," (California: SAGE Publications, 2002), 56.
- Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan," Yayasan Kehati, 2024.
- Perjalanan 10 Tahun Mengubah Gagasan Besar Menjadi Aksi Nyata - *World Resources Institute* Indonesia: <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/2024-08/2024%20Outcome%20Report.pdf>

- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Rogers, E. M. (1976). *Communication and Development: Critical Perspectives*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Rohman, M. A., & Iskandar, M. (2021). *Penggunaan Media Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Program Konservasi Hutan di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*, 15(2), 123–135.
- Sari, D. P. (2020). Pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains pada topik pemanasan global untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam konservasi lingkungan. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 10(2), 123–135.
- Servaes, J. (1999). *Communication for Development: One World, Multiple Cultures*. New Jersey: Hampton Press.
- Sistem Informasi Perhutanan Sosial Aceh.
- Smith, R. D. (2013). *Strategic Planning for Public Relations*. New York: Routledge.
Footnote: Smith (2013)
- Soedjono, E. (2019). *Pendekatan Holistik-Ekologis sebagai Alternatif Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(1), 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 8.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pasal 1 Ayat 1.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Petunjuk Teknis Verifikasi Usulan Perhutanan Sosial.

Spradley, J.P., "Participant Observation," (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), 34.

Sudirman, S., & Nurhadi, N. (2018). Penggunaan bahasa yang jelas dan sesuai dengan konteks budaya lokal dalam komunikasi konservasi lingkungan. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*, 10(2), 123–135.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2017).

World Resources Institute . (2018). *Laporan Pendampingan Masyarakat di Hutan Kemasyarakatan Kalimantan*. Jakarta: WRI Indonesia.

World Resources Institute, "Community-Based Forest Management: A Case Study of HKm Bukit Sultan," (Washington, D.C.: WRI, 2022), 25.

WRI Indonesia. (2022). *Perhutanan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: WRI Indonesia.

WRI Indonesia. (2024). *Perhutanan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: WRI Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Wawancara Informan: WRI Indonesia

No	IDENTITAS INFORMAN	INRFORMAN
1	Nama Informan	Malahati, Ahmad Nasution
2	Jabatan/Posisi	(Database Assistant WRI)
3	Instansi/Organisasi	WRI
4	Lokasi Wawancara	Kantor WRI Banda Aceh
5	Tanggal Wawancara	11 Maret, 2025
6	Pewawancara	Afiadi (Peneliti)

1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan WRI dalam menyampaikan program perhutanan sosial kepada masyarakat HKM Bukit Sultan?

“Dalam proses penyampaian program perhutanan sosial, kami tidak serta-merta langsung memberikan materi atau informasi. Kami terlebih dahulu melakukan pendekatan personal dengan tokoh-tokoh masyarakat, lalu melakukan pertemuan-pertemuan kecil untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, barulah kami masuk ke tahap sosialisasi program secara menyeluruh.” (Wawancara dengan Malahayati, Database Assistant WRI Indonesia, 11 Maret 2025)

“Masyarakat lebih paham ketika kami menunjukkan data spasial secara langsung, dibandingkan hanya mendengar penjelasan verbal. Jadi kami tunjukkan peta interaktif, foto udara, dan ilustrasi lainnya untuk menjelaskan pentingnya menjaga dan mengelola hutan secara legal.” (Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

2. Apa saja prinsip yang menjadi dasar komunikasi antara WRI dan masyarakat lokal?

“Komunikasi yang kami bangun selalu berdasarkan keterbukaan informasi. Masyarakat harus tahu program ini untuk apa, bagaimana mekanismenya, dan apa yang menjadi peran mereka. Jadi tidak ada informasi yang disembunyikan.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025).

“Kami bukan datang membawa solusi, tapi datang untuk mendampingi. Masyarakat yang tahu kondisi mereka, dan mereka pula yang menentukan apa yang ingin dicapai.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

3. Seberapa penting aspek ekologi dan lingkungan hidup dalam materi atau pesan komunikasi yang disampaikan WRI?

“Kami selalu menekankan bahwa perhutanan sosial bukan hanya soal mendapatkan izin mengelola hutan, tapi tentang bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan tanpa merusaknya. Jadi, pesan-pesan ekologis itu sangat penting dan menjadi bagian utama dari pendekatan kami.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

“Kami sesuaikan juga dengan cara pandang masyarakat. Kalau masyarakat lebih dekat dengan pendekatan agama atau adat, kami gunakan itu untuk menjelaskan kenapa hutan harus dijaga.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

4. Bagaimana pendekatan partisipatif diterapkan dalam komunikasi dengan masyarakat?

“Kami tidak langsung menyampaikan materi, tapi mulai dari mendengar dulu. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka alami, baru kami sesuaikan pendekatannya.”

“Kami fasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, bahkan kalau mereka tidak setuju pun itu kami catat. Jadi pendekatan partisipatif ini bukan hanya mendengar, tapi memberi ruang untuk memutuskan bersama.”
(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

5. Apakah WRI mengadaptasi komunikasi berdasarkan budaya atau nilai lokal masyarakat HKM Bukit Sultan?

“Kami menyadari bahwa masyarakat di HKM Bukit Sultan punya kearifan lokal yang kuat. Jadi kami tidak bisa masuk dengan pendekatan yang kaku atau terlalu teknis. Kami menyesuaikan gaya komunikasi kami agar lebih bisa diterima.” (Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

“Kalau kami yang bicara terus, belum tentu didengar. Tapi kalau imam gampong yang menyampaikan pentingnya menjaga hutan lewat ceramah atau khutbah Jumat, itu pengaruhnya lebih kuat.”(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

6. Apa bentuk media atau saluran komunikasi yang paling efektif digunakan?

“Bentuk komunikasi yang paling efektif sejauh ini adalah pertemuan langsung, baik itu diskusi kelompok kecil, musyawarah desa, maupun kunjungan rumah ke rumah.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

“Kami menggunakan peta dan citra satelit untuk menjelaskan posisi lahan dan fungsi hutannya. Masyarakat lebih mudah paham kalau ada gambaran visual, tidak hanya mendengar penjelasan lisan.”(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

“Tidak semua masyarakat aktif di WhatsApp atau familiar dengan dokumen digital, jadi tetap harus seimbang. Informasi penting tetap kami sampaikan

secara langsung di lapangan.”(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

7. Apakah ada tantangan atau resistensi dari masyarakat dalam proses komunikasi?

“Awalnya masyarakat ragu, mereka takut ini hanya proyek sesaat atau ada kepentingan tersembunyi. Jadi butuh waktu untuk membangun kepercayaan itu.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

“Ada juga yang merasa bahwa hutan itu bukan urusan mereka, atau mereka takut nanti justru dilarang mengelola. Jadi kami harus pelan-pelan menjelaskan bahwa program ini bukan untuk melarang, tapi justru memberi legalitas.”(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

“Kami tidak langsung memaksakan konsep. Kami mulai dari mendengarkan dulu, lalu pelan-pelan memberikan pemahaman lewat contoh konkret dan keberhasilan dari desa lain.”(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

8. Bagaimana proses WRI membangun kepercayaan dengan masyarakat selama program berlangsung?

“Kami membangun kepercayaan bukan dengan banyak janji, tapi dengan menunjukkan komitmen. Misalnya, kami tetap hadir meski tidak ada kegiatan besar, hanya untuk berdiskusi santai atau mendengar cerita warga.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

“Saya sering ikut ronda malam, hadir saat ada hajatan, atau hanya duduk ngopi di warung. Dari situ kami mulai saling percaya, karena mereka melihat saya bukan hanya staf lembaga, tapi bagian dari komunitas mereka.” (Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

“Kalau tokoh masyarakat sudah percaya, biasanya masyarakat lainnya ikut terbuka. Jadi kepercayaan itu dibangun melalui orang-orang yang dihormati juga.”(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

9. Apakah WRI melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi komunikasinya?
Jika ya, bagaimana caranya?

“Kami punya sistem monitoring internal. Setiap bulan kami evaluasi strategi komunikasi, apakah masyarakat memahami informasi yang disampaikan, atau apakah masih ada kesalahpahaman.”(Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

“Evaluasi kami lakukan juga lewat tanya jawab langsung dengan kelompok tani. Misalnya, kalau mereka bisa menjelaskan kembali apa itu perhutanan sosial dan apa manfaatnya, berarti komunikasi kami berhasil.”(Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

10. Menurut Anda, apa kontribusi paling signifikan dari komunikasi dalam keberhasilan program ini?

“Tanpa komunikasi yang baik, masyarakat tidak akan percaya, apalagi terlibat aktif. Justru komunikasi yang membuat program ini bisa diterima dan dijalankan bersama-sama.” (Wawancara dengan Malahayati, 11 Maret 2025)

“Dulu sebagian masyarakat menganggap hutan hanya tempat ambil kayu. Sekarang mereka mulai bicara soal konservasi, zona lindung, bahkan ekowisata. Itu karena komunikasi yang membuka wawasan mereka.” (Wawancara dengan Ahmad Nasution, 13 Maret 2025)

Kesimpulannya, kontribusi paling signifikan dari komunikasi dalam program ini adalah:

1. Membangun kepercayaan,
2. Meningkatkan kesadaran ekologis,
3. Mendorong partisipasi aktif, dan
4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

Lampiran 2. Lembar Wawancara Informan: Warga/Peserta Program

No	IDENTITAS INFORMAN	INFORMAN
1	Nama Informan	Bapak Habibi, Bapak Amu
2	Jabatan/Posisi	Anggota
3	Instansi/Organisasi	Sekretaris Hkm
4	Lokasi Wawancara	AMD kopi Neusu dan Taman Rusa
5	Tanggal Wawancara	13 Maret 2025
6	Pewawancara	Afiadi

1. Apakah mengetahui Program Perhutanan Sosial, dan Darimana Awal informasi perhutanan social didapatkan?

“Bapak amu yang juga merupakan anggota kelompok, menjelaskan bahwa informasi awal terkait program perhutanan sosial ia peroleh melalui percakapan dengan rekan sesama petani. Informasi tersebut kemudian mendorongnya untuk mengikuti pertemuan yang difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pihak kehutanan. Dalam pertemuan tersebut, ia memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai pentingnya legalitas pengelolaan hutan serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.”(Wawancara Dengan Bapak amu, 13 Maret 2025)

2. Apakah Anda merasa dilibatkan dalam kegiatan atau keputusan yang berhubungan dengan hutan desa?

Berdasarkan hasil wawancara, para informan umumnya menyatakan bahwa mereka merasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan maupun proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan desa. Bapak Habibi, selaku Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), menyampaikan bahwa mekanisme pelibatan masyarakat telah diatur secara partisipatif, terutama melalui rapat kelompok yang dilaksanakan secara berkala. Dalam forum tersebut, setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengusulkan kegiatan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan kelompok, seperti pembagian hasil, jenis tanaman yang akan ditanam, serta strategi Komunikasi Pembangunan.

3. Bagaimana cara pihak WRI menjelaskan program ini kepada warga? Mudah dipahami atau sulit?

“Bapak Habibi mengungkapkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh pihak WRI relatif mudah dimengerti, terutama karena materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang tidak terlalu teknis. Menurutnya, pendekatan personal yang dilakukan oleh tim WRI, seperti menyapa dan berdialog secara langsung dengan ibu-ibu, membantu membangun rasa percaya dan membuat masyarakat lebih terbuka untuk menerima informasi. (Wawancara dengan Anggota HKm, 13 Maret 2025)”

4. Apakah Anda pernah memberikan saran, pendapat, atau kritik dalam pertemuan dengan WRI?

Bapak Habibi juga mengaku pernah menyampaikan pendapat, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan dalam kegiatan kelompok. Ia menilai bahwa WRI memberi ruang yang cukup bagi anggota, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam diskusi. Meskipun belum semua saran ditindaklanjuti, ia merasa bahwa keberadaannya sebagai anggota

dihargai dan didengarkan. ”(Wawancara dengan Anggota HKM, 13 Maret 2025)”

5. Setelah mengikuti program, apakah Anda merasa lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar?

Berdasarkan wawancara dengan para informan, diketahui bahwa keterlibatan dalam program perhutanan sosial memberikan pengaruh positif terhadap kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Bapak Habibi menyatakan bahwa sejak terlibat aktif dalam program, dirinya menjadi lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan, tidak hanya untuk keberlanjutan ekosistem, tetapi juga demi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Ia juga mulai lebih memperhatikan dampak kegiatan masyarakat terhadap kualitas tanah dan air, serta pentingnya menjaga keseimbangan fungsi hutan.

Sementara itu, Bapak amu mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti program, ia memandang hutan semata-mata sebagai sumber kayu dan lahan garapan. Namun setelah mengikuti program perhutanan sosial, pandangannya mulai berubah. Ia menyadari bahwa hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan alam, termasuk sebagai sumber air dan pelindung dari bencana alam. Ia kini lebih berhati-hati dalam beraktivitas di kawasan hutan dan lebih aktif mengajak warga lainnya untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.

6. Apakah ada perubahan pola pikir atau kebiasaan Anda terkait dengan menjaga hutan?

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi dalam program perhutanan sosial telah mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan para informan terkait dengan upaya menjaga kelestarian hutan. Bapak Habibi mengungkapkan bahwa sebelumnya masyarakat cenderung memanfaatkan hutan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Namun setelah mengikuti program, ia pribadi mulai lebih selektif dan bertanggung jawab dalam mengambil hasil

hutan, serta lebih aktif mengajak anggota kelompok untuk menerapkan prinsip-prinsip konservasi, seperti menanam pohon pengganti dan menjaga tutupan lahan.

Senada dengan itu, Bapak Amu menyampaikan bahwa pola pikirnya turut berubah sejak terlibat dalam program. Ia mulai memandang hutan bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai aset bersama yang harus dijaga. Ia pun mulai meninggalkan praktik-praktik yang merusak, seperti membuka lahan dengan cara membakar, dan menggantinya dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, ia kini lebih aktif terlibat dalam kegiatan patroli hutan bersama anggota kelompok lainnya untuk mencegah perambahan liar.

7. Apa kegiatan atau pelatihan yang menurut Anda paling bermanfaat selama program berlangsung?

Bapak Habibi juga menilai bahwa pelatihan terkait dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi kegiatan yang sangat berguna. Ia menjelaskan bahwa dengan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan ini, ia bersama kelompoknya mulai bisa mengolah hasil hutan, seperti madu dan rotan, untuk dijadikan produk bernilai jual. Pelatihan tersebut, menurut Bapak Habibi, tidak hanya meningkatkan keterampilan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih memperhatikan keberagaman produk yang bisa dihasilkan dari hutan, selain kayu.

8. Bagaimana hubungan antara sesama warga dalam mengelola hutan secara bersama-sama?

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hubungan antarwarga dalam mengelola hutan secara bersama-sama di desa ini terjalin dengan baik dan didasarkan pada prinsip gotong royong serta saling percaya. Bapak Habibi, sebagai Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), menjelaskan bahwa kerjasama antarwarga dalam kelompok sangat penting, terutama dalam hal pembagian tugas, pemeliharaan hutan, dan pengambilan keputusan bersama. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi yang terbuka dan saling menghargai

antaranggota kelompok sangat mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Keterlibatan semua anggota kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pertemuan dan diskusi menjadikan mereka merasa lebih terikat satu sama lain. Bapak Habibi menilai bahwa kegiatan bersama ini turut memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga.

Sementara itu, Bapak Amu menyatakan bahwa dalam mengelola hutan bersama-sama, terdapat rasa saling mendukung dan membantu antara sesama anggota. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya mungkin ada perbedaan pendapat terkait metode atau pembagian hasil, namun melalui musyawarah, semua perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam praktiknya, anggota kelompok saling membantu, baik dalam hal tenaga maupun informasi terkait dengan pengelolaan hutan. Hal ini membuat suasana kerja sama terasa lebih harmonis dan memperkuat ikatan sosial antarwarga.

9. Apakah ada kendala dalam memahami informasi dari pihak luar seperti WRI?

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa beberapa informan menghadapi tantangan dalam memahami informasi yang disampaikan oleh pihak World Resources Institute (WRI) Indonesia, meskipun secara umum komunikasi telah berjalan dengan baik. Bapak Habibi mengungkapkan bahwa pada awalnya, sebagian anggota kelompok merasa kesulitan dalam memahami istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penyampaian materi. Misalnya, konsep-konsep terkait dengan teknik pengelolaan hutan yang berbasis pada ilmu silvikultur dan prinsip-prinsip konservasi yang cukup kompleks. Namun, ia menjelaskan bahwa pihak WRI secara bertahap memberikan penjelasan tambahan dan menggunakan contoh praktis yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal.

10. Menurut Anda, apa harapan masyarakat terhadap program ini ke depan?

Dari wawancara yang dilakukan, para informan menyampaikan beberapa harapan terhadap kelanjutan program perhutanan sosial di masa mendatang. Bapak Habibi mengungkapkan bahwa masyarakat berharap agar program ini dapat terus berlanjut dan semakin diperluas cakupannya, khususnya dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan teknis yang lebih mendalam. Ia berharap bahwa dengan adanya pelatihan lebih lanjut, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada pihak luar. Selain itu, ia juga menginginkan agar program ini dapat memberikan peluang pasar yang lebih luas bagi hasil hutan yang mereka kelola, seperti produk hutan bukan kayu (HHBK) yang bisa meningkatkan



Lampiran 3. Wawancara Dengan Narasumber



Dokumentasi Penelitian Setelah Wawancara Dengan Bapak Rakhmat Hidayat selaku
(Sumatera Regional Senior Manager)



Dokumentasi Penelitian, Wawancara Dengan Bapak Amri Abdullah Selaku *(Community
Business Development)*



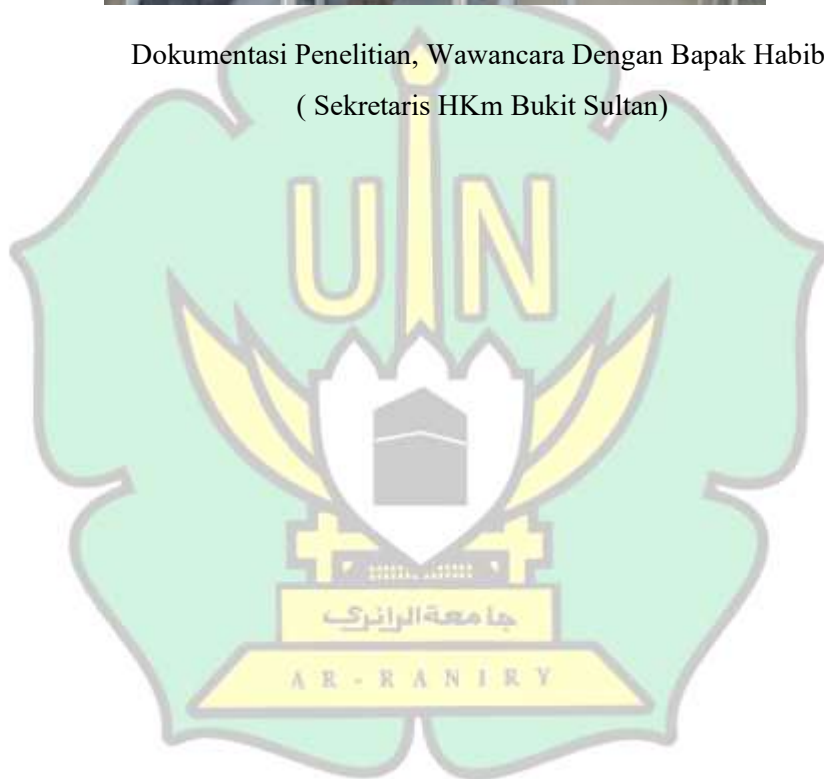
Dokumentasi Penelitian, Wawancara Dengan Ibu Malahayati selaku (*Database Assisten*
WRI



Dokumentasi Penelitian, Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nasution Selaku
(*Research Analyst on Land Use Governance* di WRI)



Dokumentasi Penelitian, Wawancara Dengan Bapak Habibi
(Sekretaris HKm Bukit Sultan)



Lampiran 3. Kegiatan Diskusi Kelompok



Dokumentasi FGD Dengan Kelompok HKm Bukit Sultan Yang Sedang Melakukan Kegiatan
Penyusunan AD/ART HKm Bukit Sultan

Lampiran 4. Penerimaan Bantuan Bibit dari DPRK Aceh Besar



Dokumentasi Serah Terima 3.900 Bibit Pohon Durian, Rambutan, dan Pala dari Dana Aspirasi Anggota DPRK Kab. Aceh Besar (Desember 2024)

Lampiran 5. Penerimaan Bantuan Bibit dari DLHK Aceh



Dokumentasi Serah terima bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.000 batang Bibit Pete, Cengkeh, Durian, dan Nangka (15 Oktober 2024)

AR-RANIRY

Lampiran 6. SK HKm Bukit Sultan dan Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH I
Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap, Gampong Lempoh Daya, Kecamatan Jaya Baru
Banda Aceh Kode Pos 23235
E-mail : kph.i.aceh@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH I
Nomor : SK.800/ 39 /KPH-I/XII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
PADA HKm BUKIT SULTAN DI GAMPONG LAMTANJONG
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan perlu pengembangan usaha perhutanan sosial;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditetapkan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala KPH Wilayah I tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada HKm Bukit Sultan di Gampong Lamtanjong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 12767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 Tanggal 29 September 2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Kelompok Tani Hutan Bukit Sultan Seluas ± 375 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung Di Gampong Lamtanjong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KPH WILAYAH I TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) PADA HKm BUKIT SULTAN DI GAMPONG LAMTANJONG KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada HKm Bukit Sultan di Gampong Lamtanjong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh untuk jenis usaha yaitu **Wisata Alam**.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Desember 2024

KEPALA KPH WILAYAH I,


TEUKU KAMARUZZAMAN SYAH, S.Hut., M.P.
Pembina
NIP. 19740307 200504 1 001

- Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh di Banda Aceh;
 3. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Medan;
 4. Yang bersangkutan;

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
WISATA SULTAN PADA HKm BUKIT SULTAN
GAMPONG LAMTANJONG KECAMATAN SUKAMAKMUR
KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH**

Ketua	: Muharil
Sekretaris	: Syawaluddin
Bendahara	: Atika Suzanna
Anggota	:
	1. Surahman Habibi
	2. Nurlistiana
	3. Risma
	4. Rismihadi
	5. Ramadhan
	6. Fahri Akbar
	7. M. Yasir
	8. M. Jabir
	9. Sulaiman
	10. Juliah
	11. Nursetiana
	12. Iqbal
	13. Safrizal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.945/Un.08/FDK-I/PP.00.9/04/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pimpinan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (World Resources Institute Foundation); 2. Ketua Hutan Kemasyarakatan HKM Bukit Sultan Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa: NIM

180401070

Nama : AFIADI

Program Studi/Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat : SALUR LASENGALU KECAMATAN TEUPAH BARAT KABUPATEN
SIMEULUE

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***STRATEGI KOMUNIKASI YAYASAN SUMBER DAYA DUNIA (WORLD RESOURCES INSTITUTE FOUNDATION) INDONESIA DALAM PROSES PENDAMPINGAN KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DI HUTAN KEMASYARAKATAN HKM BUKIT SULTAN, LAMTANJONG ACEH BESAR***

Banda Aceh, 29 April 2025 An.

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si. NIP.

197210201997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2025



Wisma PMI, Lantai 3
Jalan Wijaya I No. 63
Jakarta Selatan 12170 - Indonesia
Phone: +62 21 2275762
www.wri-indonesia.org

Banda Aceh, 2 Mei 2025

Nomor : 4/V/WRI/SRO-FOR/2025
Perihal : Surat Keterangan
Lampiran : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara nomor B.945/Un.08/FDK-I/PP.00.0/04/2025 pada tanggal 29 April 2025 perihal izin penelitian terkait dengan bahan penulisan tugas akhir yang berjudul "Strategi Komunikasi Yayasan Sumber Daya Dunia (World Resources Institute Foundation) Indonesia Dalam Proses Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial Di Hutan Kemasyarakatan Bukit Sultan, Sibreh, Aceh Besar".

Mengenai hal tersebut di atas, dapat kami beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Afiadi
NIM : 180401070

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penelitian/pengambilan data/dokumen yang diperlukan pada Yayasan Sumber Daya Dunia (World Resources Institute Foundation) Indonesia dan HKM Bukit Sultan, Aceh Besar.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Terima Kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rakhmat Hidayat", is written over the WRI Indonesia logo.

WRI INDONESIA

Rakhmat Hidayat
Sumatera Regional Senior Manager
WRI Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Afiadi
Tempat / Tgl. Lahir : Salur / 10 Januari 1998
Kecamatan : Teupah Barat
Kabupaten : Simeulue
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM / Jurusan : 180401070 / Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Sultan Alaidin Johansyah, Neusu Aceh
Kecamatan : Baiturrahman
Kota : Banda Aceh
Provinsi : Aceh
Email : Apitmantarafak98@gmail.com

Riwayat Pendidikan MI/SD/Sederajat : SDN 3 Teupah Barat Lulus 2010

MTs/SMP/Sederajat : SMPN 1 Teupah Barat 2013

MA/SMA/Sederajat : SMAN 1 Teupah Barat 2016

Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Abdul Hamid
Nama Ibu : Asmaniar
Pekerjaan Orang Tua : Petani
Alamat Orang Tua : Salur Lasengalu
Kecamatan : Teupah Barat
Kabupaten : Simeulue
Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 21 April 2025

Peneliti

Afiadi